

**KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM KEANGGOTAAN REGIONAL  
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN 2020:  
ANALISIS DIPLOMASI EKONOMI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Nur Biyantara Efendi**  
21323166

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM KEANGGOTAAN REGIONAL  
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN 2020:**

**ANALISIS DIPLOMASI EKONOMI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**NUR BIYANTARA EFENDI**

21323166

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kebijakan Australia Dalam Keanggotaan Regional Comprehensive  
Economic Partnership (RCEP) Tahun 2020: Analisis Diplomasi Ekonomi**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Tanggal Ujian  
19 Agustus 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

*Hangga Fathana*  
*Mohammad Rezky Utama*  
*Ayu Heryati Naqsabandiyah*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.



## DAFTAR ISI

<b>KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM KEANGGOTAAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN 2020: ANALISIS DIPLOMASI EKONOMI .....</b>	<b>i</b>
<b>KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM KEANGGOTAAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN 2020: ANALISIS DIPLOMASI EKONOMI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Argumen Sementara.....</b>	<b>15</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian .....</i>	<i>16</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....</i>	<i>16</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....</i>	<i>16</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian .....</i>	<i>17</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB 2 .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1. Asal Usul Terbentuknya Regional Comprehensive Economic Partnership .....</b>	<b>19</b>
<b>2.2. Faktor dan Tujuan Terbentuknya Regional Comprehensive Economic Partnership .....</b>	<b>23</b>

<b>2.3. Cara Kerja dan Kondisi Objektif dari Hubungan Antar Negara Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership</b> .....	27
<b>BAB 3</b> .....	32
<b>Analisis Faktor Pendorong Partisipasi Australia Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership</b> .....	32
<b>3.1 Kekuatan Ekonomi Relatif</b> .....	32
<b>3.2 Rezim Internasional</b> .....	45
<b>3.3 Kepentingan Negara</b> .....	52
<b>3.4 Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik</b> .....	58
<b>3.5 Faktor Ideasional</b> .....	64
<b>BAB 4</b> .....	71
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	71
<b>4.2 Rekomendasi</b> .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Posisi dan Daya Tawar Australia dalam RCEP Berdasarkan Data Ekonomi	35
Tabel 2. Proporsi Ekspor Australia ke Asia Timur dan ASEAN (2022–2023) .....	37
Tabel 3. Perbandingan Market Size Australia vs Negara Mitra RCEP (2023) .....	39
Tabel 4. Statistik Kapasitas Negosiasi Australia dan Daya Tawar Regionalnya .....	42
Tabel 5. Kontribusi Australia terhadap Isu Perubahan Iklim (2019–2023) .....	44
Tabel 6. RCEP sebagai Rezim Ekonomi Regional dan Alasan Australia Bergabung	48
Tabel 7. Indikator Kepentingan (Interests) – Australia dan RCEP .....	53
Tabel 8. Institusi dan Pengambilan Kebijakan Domestik – Australia dan RCEP .....	59

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada periode 2019–2023. Sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, RCEP melibatkan 15 negara anggota yang mewakili sekitar 30% PDB global. Bagi Australia, partisipasi ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan ekonomi luar negeri, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun strategi geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang memanfaatkan dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan kerangka teori *New Economic Diplomacy* (Woolcock, 2017) melalui lima dimensi: kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan negara, institusi dan proses pengambilan kebijakan domestik, serta faktor ideasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Australia sebagai pemasok energi dan pertanian meningkatkan daya tawarnya; rezim RCEP memberikan aturan perdagangan yang lebih harmonis; kepentingan negara mencakup tujuan ekonomi sekaligus politik strategis; koordinasi institusi domestik menjadi kunci ratifikasi; serta faktor ideasional menegaskan orientasi Australia pada tatanan berbasis aturan. Dengan demikian, keputusan Australia bergabung dalam RCEP tidak hanya didorong motif ekonomi, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor strategis, institusional, dan ideologis, sehingga menegaskan relevansi teori *New Economic Diplomacy* dalam memahami dinamika kebijakan ekonomi luar negeri.

**Kata-kata kunci:** *Australia, RCEP, integrasi ekonomi, ekonomi politik, Asia-Pasifik, kebijakan luar negeri, perjanjian perdagangan, geopolitik, kerja sama regional, perdagangan global.*

## ABSTRACT

This study analyzes the factors influencing the Australian government's policy to join the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) during the period of 2019-2023. As the largest free trade agreement in the world, RCEP involves 15 member countries that represent approximately 30% of global GDP. For Australia, this participation has significant implications for foreign economic policy, both in trade, investment, and geopolitical strategy in the Asia-Pacific region. This research employs a qualitative approach using a literature study method, utilizing official government documents, reports from international institutions, and academic literature. The analysis is conducted using the framework of New Economic Diplomacy theory (Woolcock, 2017) through five dimensions: relative economic power, international regimes, national interests, institutions and domestic policy-making processes, as well as ideational factors. The research results indicate that Australia's position as an energy and agricultural supplier enhances its bargaining power; the RCEP regime provides more harmonious trade rules; the interests of the state encompass both economic goals and strategic political aims; domestic institutional coordination is key to ratification; and the ideational factors underscore Australia's orientation towards a rules-based order. Thus, Australia's decision to join RCEP is not solely driven by economic motives, but is a result of a complex interaction among strategic, institutional, and ideological factors, thereby affirming the relevance of New Economic Diplomacy theory in understanding the dynamics of foreign economic policy.

**Keywords:** *Australia, RCEP, economic integration, political economy, Asia-Pacific, foreign policy, trade agreement, geopolitics, regional cooperation, global trade.*



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam tatanan global, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi pondasi penting dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian pasar internasional. Negara-negara cenderung membentuk blok perdagangan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi hambatan tarif dan nontarif, serta memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global. Di tengah dinamika ketegangan geopolitik, perang dagang, dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kawasan Asia-Pasifik telah berkembang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat manufaktur dan perdagangan, tetapi juga menjadi ruang kontestasi pengaruh antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Peter et al., 2020). Dalam konteks tersebut, negara-negara kawasan memerlukan instrumen kerja sama ekonomi yang mampu memastikan keterhubungan pasar dan stabilitas jangka panjang.

Australia, sebagai negara dengan orientasi ekonomi terbuka dan berbasis ekspor, secara strategis terintegrasi dalam struktur ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Meskipun dari sisi jumlah penduduk Australia tergolong kecil, namun Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu menempati posisi tinggi di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Australia memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertambangan, energi, pertanian, jasa pendidikan, dan teknologi, yang semuanya sangat bergantung pada pasar ekspor, terutama ke negara-negara Asia Timur dan ASEAN. Menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), lebih dari 58% perdagangan Australia pada tahun 2021 dilakukan dengan negara-

negara mitra RCEP (DFAT, 2021). Keterlibatan dalam kerja sama ekonomi *regional* seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) menunjukkan komitmen jangka panjang Australia terhadap integrasi ekonomi kawasan.

Di tengah perkembangan tersebut, Australia turut serta dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan bebas yang mencakup lima belas negara, yakni sepuluh anggota ASEAN serta Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. RCEP resmi ditandatangani pada 15 November 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Perjanjian ini mencakup hampir sepertiga populasi dunia dan lebih dari 30% PDB global, menjadikannya sebagai blok dagang terbesar di dunia (Peter et al., 2020). Partisipasi Australia dalam RCEP tidak dapat dilihat sekadar sebagai bentuk pragmatisme ekonomi. Kebijakan ini juga merupakan ekspresi dari strategi jangka panjang Australia untuk mempertahankan relevansi ekonomi dan geopolitiknya dalam rezim internasional yang sedang berubah.

Namun demikian, keterlibatan Australia dalam RCEP menimbulkan sejumlah pertanyaan penting dalam diskursus kebijakan luar negeri ekonomi. Apakah kebijakan ini murni didorong oleh kalkulasi keuntungan ekonomi? Ataukah ada pengaruh dari institusi domestik, norma internasional, dan preferensi ideologis yang mendasari kebijakan tersebut? Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan Diplomasi ekonomi baru dari Woolcock (2017). Pendekatan ini menawarkan kerangka teoritis yang holistik untuk menganalisis kebijakan luar negeri ekonomi modern melalui

lima dimensi utama: kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan nasional, institusi domestik dan proses pengambilan kebijakan, serta faktor ideologis.

Dari sisi kekuatan ekonomi relatif, Australia merupakan negara dengan daya tawar yang signifikan meskipun populasinya kecil. Dengan basis ekspor yang kuat dan keterikatan tinggi dengan pasar Asia, Australia memiliki insentif besar untuk mengamankan akses pasar melalui mekanisme multilateral seperti RCEP. Keanggotaan dalam RCEP memungkinkan Australia untuk menurunkan tarif, menyederhanakan aturan asal barang, serta memperluas peluang investasi di sektor-sektor unggulan seperti agrikultur dan teknologi ((DFAT, 2021). Dalam kerangka *regional*, Australia juga memposisikan dirinya sebagai mitra dagang yang kredibel dan stabil di tengah ketidakpastian hubungan AS–Tiongkok.

Dari perspektif rezim internasional, RCEP memberikan kerangka baru dalam membentuk aturan perdagangan kawasan. Pasca kegagalan Amerika Serikat dalam mempertahankan komitmennya terhadap Trans-Pacific Partnership (TPP), RCEP muncul sebagai alternatif regionalisme ekonomi berbasis Asia. Australia memandang RCEP sebagai bentuk nyata dari *rules-based order* yang menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Australia sebagaimana tercantum dalam *Foreign Policy White Paper 2017* (DFAT, 2017). Keterlibatan dalam RCEP memungkinkan Australia untuk berpartisipasi dalam penyusunan norma, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi juga sebagai co-architect dari tatanan perdagangan Asia yang baru (Armstrong, 2022).

Kepentingan nasional juga menjadi faktor krusial. Aktor-aktor domestik memainkan peran penting dalam membentuk sikap pemerintah terhadap RCEP.

Australian Industry Group (AiG), misalnya, mendorong pemerintah untuk mempercepat akses pasar ke kawasan melalui penghapusan hambatan dagang. National Farmers' Federation (NFF) memandang RCEP sebagai peluang memperluas ekspor produk pertanian Australia yang selama ini menghadapi tarif tinggi di beberapa negara Asia. Sementara itu, Group of Eight (Go8) sebagai representasi perguruan tinggi riset mendukung RCEP untuk memperkuat mobilitas akademik dan ekspor jasa pendidikan (DFAT, 2021).

Namun demikian, tidak semua aktor domestik menyambut positif keanggotaan Australia dalam RCEP. Australian Council of Trade Unions (ACTU) menilai bahwa RCEP mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja dan tidak mencantumkan klausul kuat mengenai standar buruh internasional (ACTU, 2020). Kelompok-kelompok lingkungan juga mengkritik RCEP karena dianggap memperkuat model pertumbuhan eksploitatif tanpa jaminan keberlanjutan ekologi. Kritik-kritik ini mencerminkan adanya benturan kepentingan dalam ruang domestik, yang merupakan ciri khas diplomasi ekonomi era modern (Ravenhill, 2017).

Selain itu, proses pengambilan kebijakan dalam kebijakan luar negeri Australia cenderung terpusat pada eksekutif. DFAT menjadi institusi utama yang mengatur negosiasi, konsultasi, dan ratifikasi perjanjian. Parlemen dan masyarakat sipil, meskipun tidak sepenuhnya terpinggirkan, memiliki ruang partisipasi yang terbatas. Hal ini menandakan bahwa kebijakan untuk bergabung ke dalam RCEP bukan semata hasil deliberasi demokratis, melainkan lebih sebagai hasil dari proses teknokratis yang didorong oleh kepentingan strategis negara (Armstrong & Drysdale, 2022).

Terakhir, faktor ideologis juga turut membentuk kebijakan Australia. Komitmen terhadap nilai-nilai liberalisme ekonomi, multilateralisme, dan tatanan berbasis aturan (*rules-based international order*) telah menjadi ciri khas diplomasi Australia sejak dekade 1980-an. Dalam kerangka ini, RCEP bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat nilai-nilai yang Australia pandang penting untuk menjaga stabilitas *regional* (Woolcock, 2017).

Dengan mempertimbangkan seluruh kompleksitas tersebut, keterlibatan Australia dalam RCEP memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri ekonomi tidak pernah berdiri di atas satu motivasi tunggal. Kebijakan ini lahir dari pertemuan antara kepentingan ekonomi yang pragmatis, dinamika kekuatan regional, dorongan institusi domestik, serta komitmen ideologis terhadap tatanan perdagangan berbasis aturan. Di satu sisi, RCEP memberi peluang bagi Australia untuk memperkuat akses pasar, memperluas jaringan kerja sama, dan mempertahankan relevansi geopolitik di tengah persaingan kekuatan besar. Di sisi lain, perjanjian ini juga memunculkan perdebatan di ruang domestik mengenai dampaknya terhadap perlindungan pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan kebijakan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang tidak sederhana, dan justru menjadi medan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dari sinilah muncul pertanyaan pokok mengenai bagaimana kebijakan Australia untuk bergabung dalam RCEP dapat dipahami secara utuh, khususnya melalui kerangka diplomasi ekonomi yang mampu menelaah dimensi-dimensi tersebut secara komprehensif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Australia untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2020 dapat dipahami dalam konteks diplomasi ekonomi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti bermaksud mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dari pembentukan RCEP secara global
2. Untuk mengetahui faktor kebijakan Australia untuk bergabung dalam RCEP

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini memfokuskan analisis pada kebijakan Pemerintah Australia untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan unit analisis berupa proses perumusan kebijakan, kebijakan penandatanganan pada 15 November 2020, dan implikasi awal pasca-berlakunya perjanjian tersebut. Unit observasi mencakup dokumen resmi pemerintah Australia seperti publikasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Foreign Policy White Paper, pernyataan resmi pejabat negara, risalah parlemen, hasil konsultasi publik, serta data perdagangan makro terkait mitra RCEP. Sumber tambahan diperoleh dari siaran pers asosiasi industri dan serikat pekerja, laporan lembaga internasional, serta kajian akademik yang relevan.

Batasan waktu penelitian meliputi periode 2019 hingga 2023, yang dipilih untuk menangkap dinamika menjelang, saat, dan sesudah penandatanganan RCEP,

termasuk perubahan arsitektur perdagangan kawasan pasca keluarnya Amerika Serikat dari TPP hingga mulai berlakunya RCEP pada 1 Januari 2022. Dari segi tempat, penelitian berfokus pada tingkat nasional Australia, dengan kawasan Asia-Pasifik digunakan sebagai konteks eksternal dan bahan perbandingan terbatas.

Batasan topik penelitian mengacu pada lima dimensi utama yang dianalisis, yaitu: posisi dan kekuatan ekonomi relatif Australia dalam jaringan perdagangan kawasan; dinamika dan kerangka aturan perdagangan kawasan yang relevan dengan RCEP; artikulasi kepentingan nasional Australia, baik ekonomi maupun strategis: peran aktor serta institusi domestik dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk eksekutif, parlemen, asosiasi bisnis, serikat pekerja, dan kelompok kepentingan lain: serta nilai, orientasi, dan prinsip yang memandu kebijakan, seperti keterikatan pada tatanan berbasis aturan dan multilateralisme.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Shiro Armstrong (2022) berjudul “*Australia’s Strategic Economic Interests in East Asia’s Regional Comprehensive Economic Partnership*”, memaparkan dimensi strategis keterlibatan Australia dalam RCEP. Armstrong berpendapat bahwa meskipun hubungan bilateral Australia–Tiongkok mengalami ketegangan sejak 2017, pemerintah Australia tetap mendorong ratifikasi RCEP sebagai strategi menjaga posisi negara dalam arsitektur ekonomi kawasan. RCEP dinilai sebagai instrumen untuk memperkuat sentralitas ASEAN, mengamankan kepentingan perdagangan jangka panjang, dan memastikan keterlibatan aktif Australia dalam pembentukan aturan regional. Pendekatan ini menempatkan RCEP bukan sekadar perjanjian perdagangan, melainkan bagian dari strategi *hedging* untuk

menyeimbangkan pengaruh Tiongkok sambil mempertahankan hubungan positif dengan mitra Asia Timur lainnya (Armstrong, 2022).

Sementara itu, Australian Institute of International Affairs, Patricia Ranald (2020) dengan judul “*RCEP Has Limited Trade Gains and Ignores Labour and Human Rights*”. Tulisan ini mengkritisi RCEP dengan menyoroti keterbatasan manfaat perdagangan bagi Australia. Ranald menilai perjanjian ini tidak memasukkan klausul yang memadai terkait perlindungan hak pekerja, standar lingkungan, dan HAM. Meski mengakui potensi RCEP untuk menyederhanakan aturan asal barang dan memperkuat integrasi ekonomi, penulis menekankan bahwa ketiadaan komitmen pada isu-isu normatif dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, termasuk risiko *race to the bottom* dalam standar ketenagakerjaan. Perspektif ini merepresentasikan pandangan kritis yang melihat keberhasilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan sosial dan ekologis (Ranald, 2020).

Selain itu, diterbitkan di (Australian Outlook, 2023) dengan judul “*Australia’s Unique Opportunity in Regional Trade: The RCEP*”, berfokus pada potensi ekonomi RCEP bagi Australia. Artikel ini menekankan bahwa RCEP mencakup pasar lebih dari 2,2 miliar konsumen dan 30% PDB global, memberikan peluang signifikan bagi ekspor barang dan jasa Australia. Manfaat yang diidentifikasi meliputi penghapusan hambatan tarif, harmonisasi aturan asal barang, liberalisasi sektor jasa seperti pendidikan dan keuangan, serta peningkatan arus investasi. Diproyeksikan bahwa RCEP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional sebesar 3% dan mengurangi tingkat kemiskinan hingga 1,6%. Artikel ini

memandang keterlibatan Australia dalam RCEP sebagai peluang strategis untuk memperluas pasar ekspor, mendiversifikasi tujuan perdagangan, dan memperkuat daya saing global (Australian Outlook, 2023).

Ketiga artikel ini memiliki kesamaan mendasar dalam menyoroti kepentingan ekonomi Australia di kawasan Asia-Pasifik. Armstrong (2022) dan Australian Outlook (2023) sama-sama mengakui bahwa RCEP memperkuat akses pasar Australia, meskipun Armstrong menekankan dimensi politik-strategis sedangkan Australian Outlook lebih berfokus pada manfaat ekonomi kuantitatif. (Ranald, 2020) juga mengakui potensi integrasi ekonomi, tetapi lebih menyoroti kekurangan aspek normatif dalam perjanjian.

Perbedaan yang mencolok terlihat pada sudut pandang dan prioritas analisis. Armstrong (2022) menggunakan lensa geopolitik, menempatkan RCEP dalam kerangka *economic statecraft* untuk menjaga relevansi Australia di tengah persaingan kekuatan besar. (Ranald, 2020) mengadopsi perspektif kritis-normatif, mempertanyakan keberlanjutan perjanjian jika tidak disertai perlindungan sosial dan lingkungan. Sementara Australian Outlook (2023) memosisikan RCEP sebagai peluang ekonomi murni yang dapat dimaksimalkan melalui kebijakan perdagangan yang adaptif dan agresif.

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan ketiga artikel menunjukkan adanya *gap* yang dapat diisi melalui pendekatan *New Economic Diplomacy* (Woolcock, 2017). Tidak ada satu pun dari ketiga tulisan tersebut yang menggabungkan secara eksplisit lima variabel Woolcock kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan negara, institusi domestik, dan faktor ideasional

untuk menganalisis kebijakan Australia dalam RCEP. Dengan mengintegrasikan dimensi strategis (Armstrong), normatif (Ranald), dan ekonomis (Australian Outlook) ke dalam kerangka diplomasi ekonomi, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih holistik.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa keterlibatan Australia dalam RCEP tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi. Dari perspektif strategis, RCEP adalah instrumen geopolitik untuk mempertahankan pengaruh di kawasan (Armstrong, 2022). Dari perspektif normatif, perjanjian ini memerlukan penguatan aspek sosial dan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan (Ranald, 2020). Dari perspektif ekonomi, RCEP menawarkan peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas basis ekspor dan memperkuat daya saing global (Australian Outlook, 2023). Penelitian ini akan memanfaatkan ketiga perspektif tersebut sebagai landasan, namun memadukannya dalam analisis yang berfokus pada diplomasi ekonomi baru, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan Australia dalam RCEP.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini disusun untuk memberikan landasan teoritis yang jelas dalam menganalisis kebijakan Australia terkait keanggotaannya di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tahun 2020. Konsep klasik diplomasi secara umum merujuk pada pelaksanaan hubungan antarnegara dan entitas politik lainnya melalui agen resmi dan dengan cara-cara damai. Definisi ini menekankan aspek formal, institusional, dan politik dari diplomasi, yang

mencerminkan praktik tradisional hubungan internasional. Namun, definisi yang lebih kontemporer seperti yang dikemukakan Barston, yang dikutip oleh Stephen Woolcock pada buku *The New Economic Diplomacy* (Diplomasi ekonomi baru) menunjukkan adanya perluasan ranah diplomasi, tidak hanya antarnegara, tetapi juga antara negara dan aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan bahkan *Non-Governmental Organization* (NGO) (Woolcock 2017, 30).

Dalam konteks ini, diplomasi tidak lagi hanya soal negosiasi politik atau penyelesaian konflik, tetapi juga pengelolaan hubungan yang kompleks dan beragam dalam sistem global yang semakin saling terhubung. Oleh karena itu, untuk memahami diplomasi ekonomi secara adil dan menyeluruh, perluasan definisi diplomasi menjadi hal yang penting. Diplomasi ekonomi mencakup interaksi ekonomi lintas negara yang melibatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan. Dengan demikian, penting untuk menghilangkan stereotip sempit bahwa diplomasi hanyalah urusan politik elit, dan mulai melihatnya sebagai instrumen strategis yang juga mengatur kepentingan ekonomi nasional dalam kerangka globalisasi dan persaingan pasar internasional (Woolcock 2017, 86).

Woolcock juga menjelaskan dalam bukunya, diplomasi ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan isu-isu ekonomi internasional, dan secara teori hal ini dianggap dapat memudahkan analisis. Dalam sistem ekonomi global pasca-Perang Dunia II, yang dibentuk melalui kerangka Bretton Woods, hubungan ekonomi antarnegara diatur melalui prinsip *embedded liberalism*. Artinya, negara-negara dapat menjalankan kebijakan ekonomi domestik secara otonom selama tidak memberikan dampak negatif terhadap negara lain (Woolcock 2017, 41). Misalnya,

dalam perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT tahun 1948, terdapat batas yang jelas antara isu perdagangan yang diatur oleh GATT dan isu non-perdagangan yang berada di luar yurisdiksi internasional. Sepanjang kebijakan domestik tidak diskriminatif terhadap barang impor, negara bebas menentukan arah kebijakan dalam negeri.

Dalam praktiknya, batas antara kebijakan domestik dan internasional menjadi semakin kabur. Globalisasi ekonomi selama tujuh dekade terakhir, terutama sejak 1990, telah menyebabkan interdependensi yang mendalam antarnegara. Hal ini membuat diplomasi ekonomi tidak lagi hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga harus memperhatikan dampak kebijakan domestik terhadap sistem global (Woolcock 2017, 22). Contoh nyatanya adalah krisis keuangan global 2007–2008, yang dipicu oleh kebijakan domestik Amerika Serikat di sektor perumahan. Meskipun sektor tersebut tergolong domestik, dampaknya menyebar secara internasional, menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi kini harus menjangkau dimensi internal suatu negara.

Menurut Woolcock, ada lima variabel dalam konsep diplomasi ekonomi baru untuk menganalisa kebijakan ekonomi antar-negara (Woolcock 2017, 61), antara lain;

#### 1. Kekuatan Ekonomi Relatif

Kemampuan suatu negara untuk membentuk agenda dan mempengaruhi hasil negosiasi sangat dipengaruhi oleh ukuran dan kekuatan ekonominya. Negara dengan ekonomi besar memiliki lebih banyak sumber daya finansial, daya tarik pasar, serta pengaruh terhadap isu global seperti lingkungan. Hal ini memberi mereka posisi tawar yang

lebih kuat dalam negosiasi internasional. Selain itu, negara-negara maju umumnya memiliki kapasitas administratif yang lebih baik serta akses terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kondisi ini memungkinkan mereka mengambil kebijakan yang lebih strategis dan berbasis informasi dalam proses diplomasi ekonomi.

## 2. Rezim Internasional

Dalam kerangka Diplomasi ekonomi baru Woolcock, (2017), rezim internasional dipahami sebagai institusi normatif yang berisi aturan dan prosedur yang mengarahkan interaksi negara dalam ekonomi global. Rezim ini hadir sebagai variabel perantara yang menjamin keberlangsungan kerja sama meski dominasi hegemon melemah, berbeda dari logika *hegemonic stability theory*. Secara historis, rezim internasional berakar pada sistem Bretton Woods, GATT, hingga WTO yang memperkuat *embedded liberalism*. Dalam konteks regional, RCEP merepresentasikan rezim baru yang mengintegrasikan perjanjian bilateral Asia-Pasifik. Bagi Australia, rezim ini penting untuk kepastian hukum, stabilitas pasar, serta konsistensi dengan orientasi *rules-based order*.

## 3. Kepentingan Negara

Pendekatan berbasis masyarakat dalam diplomasi ekonomi menekankan bahwa negara bukanlah aktor tunggal, melainkan hasil dari agregasi berbagai kepentingan domestik seperti perusahaan, serikat pekerja, dan juga NGO. Kepentingan negara dibentuk dari negosiasi antar aktor ini, dan negara bertindak berdasarkan hasil kompromi tersebut.

Dalam pendekatan ini, aktor-aktor dalam negosiasi tersebut mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pilihan, baik dalam bentuk keuntungan ekonomi maupun manfaat politik, seperti dukungan sebuah kelompok. Sering kali, manfaat ekonomi tersebar luas, sementara biaya dipikul oleh kelompok tertentu, sehingga pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan ini agar tidak menghambat proses diplomasi atau kebijakan internasional.

#### 4. Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik

Pilihan suatu pihak dalam diplomasi ekonomi tidak terbentuk secara independen, melainkan dipengaruhi oleh institusi yang mengatur proses pengambilan kebijakan. Institusi menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda serta bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan. Dalam konteks hubungan prinsipal-agen, prinsipal biasanya merupakan lembaga legislatif atau aktor berkekuatan veto terhadap hasil negosiasi, sedangkan agen adalah negosiator utama atau instansi yang menjalankan negosiasi tersebut. Hubungan ini memastikan bahwa proses negosiasi tetap sejalan dengan kepentingan politik dan hukum dari pihak-pihak yang memiliki otoritas formal dalam negara.

#### 5. Faktor Ideasional

Dalam diplomasi ekonomi, kebijakan sering kali diambil dalam kondisi rasionalitas terbatas, yang membuka ruang bagi peran ide dan keyakinan. Pandangan dunia atau ideologi aktor—seperti liberalisme atau merkantilisme—dapat memengaruhi bagaimana mereka menilai

situasi dan mengambil kebijakan. Seorang aktor dengan pandangan liberal cenderung fokus pada keuntungan bersama dan perdagangan bebas, sementara aktor dengan pandangan merkantilisme akan lebih menekankan keuntungan relatif dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, ideologi yang dianut para pelaku diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan dan hasil negosiasi internasional.

### **1.7 Argumen Sementara**

Kebijakan Australia untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merefleksikan interaksi lima variabel Diplomasi ekonomi baru Woolcock,(2017). Secara ekonomi, Australia memanfaatkan keunggulan relatif untuk mengamankan pasar ekspor dan meningkatkan posisi tawar di kawasan. Rezim internasional yang dihasilkan RCEP menyediakan kerangka *rules-based order* yang selaras dengan orientasi kebijakan luar negeri Australia. Pada level domestik, dukungan asosiasi bisnis dan sektor pertanian mendorong ratifikasi, meskipun terdapat resistensi dari serikat pekerja dan kelompok lingkungan. Secara ideasional, komitmen pada liberalisme ekonomi menegaskan bahwa keputusan bergabung bukan sekadar pragmatis, melainkan strategi normatif yang memperkuat relevansi geopolitik Australia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, guna meneliti sebuah kasus atau objek alamiah. Melalui penelitian kualitatif ini juga, nantinya dapat menemukan sebuah proses dari peristiwa. Penelitian kualitatif tersebut mengutamakan penggunaan logika induktif, dengan kategorisasi yang telah diciptakan dari penemuan penelitian dengan informasi yang ada di lapangan, dan data-data yang ditemukan (Abussamad, 2021).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah, Australia sebagai negara yang bergabung dan masuk ke dalam negara yang membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Untuk objek penelitiannya berupa RCEP, yang mana adalah perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara anggota RCEP mencakup 10 negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara), yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta lima mitra perdagangan ASEAN, yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penulis menggunakan data sekunder dengan cara menelusuri berbagai macam dokumen tertulis seperti: Jurnal, Buku, Artikel resmi, E-

book dan beberapa situs resmi di internet. Hal ini bertujuan guna menghasilkan pemahaman yang lebih akurat terkait topik yang akan diteliti.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Dalam melakukan pengumpulan data terkait topik yang dibahas, teknik yang digunakan sama seperti yang penulis jelaskan diatas. Dan nantinya akan dianalisis melalui beberapa tahapan menggunakan teori diplomasi ekonomi baru. Setelah itu barulah pada tahapan selanjutnya yakni pengumpulan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait, sekaligus membuat sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi 4 bab yang berkaitan satu dengan yang lain, yaitu diantaranya;

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab 1 penelitian ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

#### **BAB II Konteks Regional Comprehensive Economic Partnership**

Bab 2 memfokuskan pembahasan terbentuknya RCEP dan latar belakang mengapa RCEP terbentuk

#### **BAB III Analisis Faktor Pendorong Partisipasi Australia Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership**

Bab 3 akan fokus membahas poin-poin alasan mengapa Australia menjadi salah satu bagian dari perjanjian RCEP dalam pandangan variabel diplomasi ekonomi baru.

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan-kesimpulan sekaligus saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## **BAB 2**

### **Konteks Regional Comprehensive Economic Partnership**

#### **2.1. Asal Usul Terbentuknya Regional Comprehensive Economic Partnership**

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Terbentuknya RCEP tidak terlepas dari dorongan untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, yang memiliki potensi ekonomi besar dan beragam. Gagasan ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kolaborasi antarnegara demi memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Sebelum terbentuknya RCEP, berbagai bentuk perjanjian perdagangan bilateral dan regional telah dilakukan, tetapi belum ada kesepakatan komprehensif yang mampu mencakup seluruh kawasan secara luas. RCEP hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menciptakan satu platform yang menyatukan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik dalam satu perjanjian ekonomi besar (Pratama et al., 2022).

Proses terbentuknya RCEP dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Di satu sisi, negara-negara Asia Timur memiliki hubungan perdagangan yang saling terkait, terutama melalui rantai pasokan global di sektor industri dan manufaktur. Di sisi lain, ada keinginan untuk memperkuat kerja sama regional guna menghadapi tantangan global seperti perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang semakin proteksionis dan meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika dan Tiongkok (Manger, 2014). Selain itu, dinamika Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga berperan signifikan dalam

perkembangan perdagangan dunia. Dibentuk pada 1989, APEC bertujuan mendorong liberalisasi perdagangan, investasi, serta memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Meskipun tidak memiliki sifat mengikat seperti perjanjian bebas formal, APEC berfungsi sebagai forum dialog kebijakan yang efektif dalam membangun konsensus normatif mengenai perdagangan bebas (Ravenhill, 2014). Perannya turut memfasilitasi integrasi ekonomi regional dan menjadi landasan munculnya kesepakatan multilateral baru, termasuk RCEP, sehingga menunjukkan bahwa forum fleksibel dapat berkontribusi pada arsitektur perdagangan global (Peter et al, 2020). Disisi lain, ada upaya untuk mengimbangi perjanjian perdagangan bebas besar lainnya, seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang sempat menjadi pusat perhatian dunia sebelum Amerika Serikat memutuskan mundur.

Inisiatif RCEP pertama kali diusulkan oleh para pemimpin ASEAN pada 2011 sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara anggota, ingin mempertahankan peran sentralnya dalam mengarahkan integrasi ekonomi kawasan. Dengan demikian, RCEP didesain sebagai perjanjian yang dipimpin oleh ASEAN namun juga mencakup mitra ekonomi utama ASEAN, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi pusat penggerak integrasi ekonomi Asia meskipun ada pengaruh besar dari kekuatan ekonomi seperti Tiongkok dan Jepang.

Setelah proposal RCEP disetujui, negosiasi dimulai pada 2013 dengan tujuan untuk menciptakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Proses

negosiasi berlangsung cukup lama, sekitar tujuh tahun, dan melibatkan banyak tantangan serta perbedaan kepentingan antarnegara. Setiap negara memiliki preferensi kebijakan yang berbeda, baik dalam hal tarif, proteksi terhadap sektor domestik, maupun standar perburuhan dan lingkungan. Namun, kesamaan visi untuk mencapai kemakmuran bersama serta menghadapi tantangan global mendorong semua pihak untuk mencari kompromi. Pada 2020, negosiasi akhirnya mencapai kesepakatan yang solid, dan RCEP resmi ditandatangani pada November 2020 oleh 15 negara (Putri, 2023).

RCEP mencakup beberapa elemen penting, termasuk penghapusan tarif untuk produk-produk tertentu, peningkatan akses pasar untuk barang dan jasa, serta kemudahan dalam aliran investasi (Xue et al., 2024). Selain itu, RCEP juga berfokus pada peningkatan kerja sama di bidang teknologi, hak kekayaan intelektual, dan penyederhanaan prosedur bea cukai. Perjanjian ini memberikan keuntungan bagi negara-negara peserta karena membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan iklim perdagangan yang lebih stabil dan terprediksi. Selain itu, dengan adanya perjanjian ini, perusahaan-perusahaan di negara-negara anggota bisa mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan rantai pasokan regional yang lebih terintegrasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan RCEP adalah posisi strategis Asia Timur dan Pasifik sebagai pusat ekonomi dunia yang semakin penting. Kawasan ini memiliki populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang menarik minat banyak negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di sana (Lukas Andri Surya Singarimbun et al., 2022). Meskipun Amerika Serikat bukan bagian dari RCEP, perjanjian ini tetap memiliki dampak signifikan

terhadap perekonomian global karena mencakup lebih dari sepertiga populasi dunia dan sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Selain faktor ekonomi, terbentuknya RCEP juga dipengaruhi oleh aspek geopolitik. Hubungan antara beberapa negara anggota, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, memiliki sejarah ketegangan dan persaingan. Namun, melalui RCEP, negara-negara ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan memperkuat stabilitas di kawasan Asia Timur (Yunarwanto, 2019). Ini sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan politik. Di sisi lain, RCEP juga merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan global, terutama dengan meningkatnya proteksionisme dari beberapa negara besar dan fluktuasi dalam sistem perdagangan internasional.

RCEP bukan tanpa kritik. Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak perjanjian ini terhadap industri lokal, terutama di negara-negara yang ekonominya belum terlalu kuat. Kekhawatiran ini terkait dengan kemungkinan bahwa pasar domestik akan dibanjiri produk impor yang lebih murah, sehingga menimbulkan persaingan bagi industri lokal. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai standar perburuhan dan lingkungan yang mungkin terabaikan demi meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, pihak pendukung RCEP berpendapat bahwa perjanjian ini akan memberikan keuntungan jangka panjang dengan meningkatkan daya saing negara anggota dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (United Nation ESCAP, 2019).

Secara keseluruhan, terbentuknya RCEP adalah hasil dari keinginan negara-negara Asia Timur dan Pasifik untuk membangun integrasi ekonomi yang kuat dan

stabil. RCEP tidak hanya menjadi simbol kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai wujud kolaborasi strategis di tengah persaingan global. Perjanjian ini juga menegaskan peran penting ASEAN dalam memimpin integrasi ekonomi di kawasan dan memastikan bahwa Asia Timur tetap menjadi pemain utama dalam ekonomi dunia. Dengan adanya RCEP, diharapkan kawasan ini dapat lebih resilient dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan menciptakan kemakmuran bersama bagi seluruh negara anggota.

## **2.2. Faktor dan Tujuan Terbentuknya Regional Comprehensive Economic Partnership**

Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya RCEP. Kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dengan populasi yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat. Sebagai pusat produksi dan konsumsi global, kawasan ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam rantai pasokan global, terutama dalam industri manufaktur. RCEP bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antarnegara di kawasan ini dengan menyederhanakan tarif dan prosedur bea cukai, sehingga dapat mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Melalui perjanjian ini, negara-negara anggota dapat meningkatkan akses pasar ke negara lain, memperluas ekspor, dan menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis lokal untuk berkembang (Yunarwanto, 2019).

Selain faktor ekonomi, terbentuknya RCEP juga didorong oleh faktor geopolitik. Kawasan Asia Timur selama ini menjadi medan persaingan kekuatan besar dunia, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun Amerika

Serikat tidak tergabung dalam RCEP, perjanjian ini memberikan platform bagi negara-negara Asia untuk membangun aliansi ekonomi yang lebih kuat guna mengurangi ketergantungan pada negara-negara di luar kawasan, termasuk Amerika (Rusmin et al., 2021). RCEP dapat dianggap sebagai upaya strategis untuk mengurangi dampak negatif dari tensi geopolitik yang terjadi di kawasan ini dan sebagai penyeimbang atas perjanjian perdagangan bebas lainnya, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). Bagi negara-negara ASEAN, RCEP juga penting untuk memperkuat posisi mereka di tengah ketidakpastian global dan memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi pemain kunci dalam peta ekonomi dunia.

Salah satu tujuan utama RCEP adalah untuk menyatukan berbagai perjanjian perdagangan bilateral yang telah ada antara negara-negara anggota. Sebelum RCEP, ASEAN telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, tetapi perjanjian ini bersifat terpisah-pisah dan tidak selalu harmonis (Yudono et al., n.d.). RCEP mengatasi masalah ini dengan menciptakan satu perjanjian yang menyatukan semua negara anggota dalam satu kerangka kerja yang komprehensif. Hal ini tidak hanya membuat perdagangan menjadi lebih efisien, tetapi juga mengurangi ketidakpastian bagi pelaku bisnis yang beroperasi di berbagai negara anggota. Dengan adanya kesepakatan yang seragam, pelaku bisnis dapat lebih mudah merencanakan investasi dan perdagangan lintas negara tanpa harus menghadapi perbedaan aturan dan regulasi yang terlalu besar.

Di sisi lain, tujuan RCEP juga mencakup peningkatan kolaborasi di bidang investasi. Investasi asing langsung (FDI) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang penting bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Dengan RCEP, diharapkan ada peningkatan arus investasi antarnegara yang dapat mendorong perkembangan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan transfer teknologi. RCEP telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor dengan menyediakan perlindungan hukum yang lebih baik serta memfasilitasi aliran modal yang lebih lancar. Ini memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara-negara anggota dalam upaya mereka mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Zreik, 2025).

Faktor lain yang mendorong terbentuknya RCEP adalah kebutuhan akan peningkatan daya saing di pasar global. Persaingan ekonomi antarnegara semakin ketat, terutama dengan munculnya negara-negara berkembang lainnya yang juga berusaha meningkatkan posisinya di kancah global (Gultom, 2020). RCEP memberikan peluang bagi negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal, sehingga mereka dapat lebih mampu bersaing di pasar internasional. Melalui peningkatan kerja sama dalam bidang inovasi, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, RCEP diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antarnegara anggota.

Selain itu, terbentuknya RCEP juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pandemi. Pandemi COVID-19, misalnya, telah menunjukkan betapa pentingnya kerja sama regional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. RCEP menawarkan platform untuk bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang lebih tangguh dalam menghadapi krisis global (Budi Utomo, 2023). Melalui kerja sama yang lebih erat, negara-negara anggota dapat berbagi informasi, teknologi,

dan sumber daya untuk menangani tantangan yang bersifat lintas negara. RCEP juga mencakup kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual yang dapat mendorong inovasi di bidang teknologi dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif.

Di samping tujuan-tujuan tersebut, RCEP juga dianggap memberikan dampak sosial yang signifikan. Peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses terhadap produk dan layanan, serta meningkatkan taraf hidup. Melalui kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, RCEP memberikan peluang bagi pengembangan keterampilan sumber daya manusia di negara-negara anggota. Dengan demikian, RCEP tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat di kawasan ini (Armstrong & Drysdale, 2022)

Tujuan dan faktor-faktor yang melandasi terbentuknya RCEP mencerminkan keinginan negara-negara Asia Timur dan Pasifik untuk menciptakan kerangka kerja ekonomi yang kuat dan stabil. Dengan RCEP, negara-negara anggota berharap dapat menciptakan integrasi ekonomi yang lebih mendalam, memperkuat daya saing di kancah global, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. RCEP menjadi simbol penting dari kerja sama multilateral di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan, serta menunjukkan bahwa melalui kolaborasi, kawasan Asia Timur dan Pasifik dapat mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama.

### **2.3. Cara Kerja dan Kondisi Objektif dari Hubungan Antar Negara Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership**

Cara kerja RCEP didasarkan pada prinsip memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi regional melalui serangkaian aturan dan kesepakatan untuk memudahkan aliran barang, jasa, modal, dan investasi antarnegara anggota. Dalam skema RCEP, masing-masing negara anggota berkomitmen untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif pada produk-produk tertentu, meningkatkan akses pasar, serta menciptakan aturan yang lebih sederhana dan transparan bagi perdagangan lintas batas. Mekanisme penghapusan tarif ini dilakukan secara bertahap, mengikuti kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing negara (Free Trade Agreement Center, 2023).

Pada praktiknya, RCEP mencakup berbagai aspek perdagangan dan investasi, termasuk aturan asal barang, akses pasar untuk barang dan jasa, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa perdagangan. Aturan asal barang (rules of origin) dalam RCEP memudahkan perusahaan untuk memproduksi dan mengekspor produk lintas negara dengan tetap memanfaatkan manfaat bebas tarif. Artinya, produk yang berasal dari salah satu negara anggota RCEP dapat diekspor ke negara anggota lain dengan tarif yang lebih rendah atau nol tarif, asalkan memenuhi persyaratan tertentu (Ulyani Tarigan & Siregar, 2023), hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan multinasional yang ingin memanfaatkan rantai pasokan di berbagai negara untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih efisien. Dengan mekanisme ini, RCEP berperan sebagai katalis dalam meningkatkan daya saing industri di kawasan ini.

Selain aspek perdagangan, seperti yang dikatakan penulis di atas, RCEP juga mengatur standar yang seragam untuk sektor jasa di antara negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota berkomitmen untuk memberikan akses pasar yang lebih besar di sektor jasa, termasuk perbankan, keuangan, kesehatan, telekomunikasi, dan pendidikan. Dengan membuka sektor jasa, RCEP memungkinkan perusahaan di negara-negara anggota untuk menawarkan layanan mereka di pasar yang lebih luas, menciptakan peluang pertumbuhan baru, dan mendukung inovasi lintas negara. Hal ini juga mendorong terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi antarnegara yang terlibat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di negara anggota (Wang et al., 2024).

RCEP memiliki mekanisme untuk memfasilitasi dan melindungi investasi antarnegara anggota. Dalam skema ini, investor diberikan kepastian hukum yang lebih baik, termasuk perlindungan dari ekspropriasi yang tidak adil, kebebasan untuk memindahkan keuntungan, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional (Gao, 2022). Dengan adanya perlindungan investasi ini, RCEP menciptakan iklim yang kondusif bagi investor asing untuk berinvestasi di negara-negara anggota, mendorong pembangunan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan adanya jaminan hukum yang jelas, RCEP menarik minat investor untuk melakukan investasi jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Kondisi objektif hubungan antarnegara dalam kerangka RCEP mencerminkan keragaman kepentingan dan karakteristik ekonomi masing-masing negara anggota. Sebagai contoh, Tiongkok dan Jepang, yang merupakan dua

kekuatan ekonomi terbesar di Asia, memiliki kepentingan besar dalam memperkuat rantai pasokan regional dan memanfaatkan akses pasar yang lebih luas di negara-negara ASEAN. Tiongkok, sebagai negara dengan basis manufaktur terbesar, memandang RCEP sebagai peluang untuk memperluas pengaruh ekonominya di kawasan Asia dan mengurangi ketergantungan pada pasar Barat. Di sisi lain, Jepang melihat RCEP sebagai kesempatan untuk memperdalam integrasi ekonomi dengan negara-negara tetangga sekaligus mempertahankan posisi strategisnya di kawasan yang kian dipengaruhi oleh Tiongkok (Yudono et al., n.d.).

Negara-negara ASEAN, yang menjadi inti dari RCEP, juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. ASEAN memanfaatkan RCEP untuk mempertahankan posisi sentralnya dalam integrasi ekonomi regional dan memastikan bahwa kepentingan mereka tidak terpinggirkan di tengah dinamika hubungan antara kekuatan besar seperti Tiongkok dan Jepang. Sebagai kelompok yang beragam dengan berbagai tingkat perkembangan ekonomi, ASEAN memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi dari perjanjian ini (Taqfir, 2025). Melalui RCEP, negara-negara ASEAN berharap dapat memperluas akses pasar bagi produk mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan. Di sisi lain, Australia dan Selandia Baru melihat RCEP sebagai cara untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan Asia Timur, mengingat kedua negara ini memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan kawasan tersebut. Kedua negara ini, yang memiliki sektor pertanian dan sumber daya alam yang besar, memanfaatkan RCEP untuk meningkatkan ekspor produk-produk agrikultur dan mineral mereka ke pasar Asia yang terus berkembang. Mereka juga berupaya

meningkatkan kerja sama di bidang jasa, khususnya pendidikan dan kesehatan, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif (Fahra Williams & Daniah, 2023). Dengan demikian, RCEP menciptakan peluang ekonomi baru bagi Australia dan Selandia Baru untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian Asia Timur.

Namun, hubungan antarnegara dalam RCEP tidak selalu berjalan mulus, mengingat adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan ekonomi masing-masing negara. Misalnya, terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara yang lebih maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, dengan negara-negara berkembang di ASEAN mengenai standar lingkungan dan perburuhan. Negara-negara maju cenderung mendorong standar yang lebih tinggi untuk melindungi lingkungan dan hak-hak pekerja, sementara negara-negara berkembang mungkin memiliki prioritas yang berbeda dan cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi cepat (Ibrahim et al., 2024). Meskipun perbedaan ini menciptakan tantangan dalam pelaksanaan RCEP, komitmen untuk mencapai kesepakatan bersama menunjukkan bahwa semua negara anggota memahami pentingnya kerja sama demi kepentingan jangka panjang.

Selain itu juga hubungan ekonomi antarnegara dalam RCEP dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang berkembang, terutama di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski Amerika Serikat bukan bagian dari RCEP, kehadiran RCEP mempengaruhi hubungan negara-negara anggota dengan Amerika, mengingat adanya kecenderungan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan teknologi Amerika. Bagi Tiongkok, RCEP menjadi alat strategis untuk memperkuat pengaruh ekonominya di kawasan Asia-Pasifik dan memperlihatkan kepemimpinannya dalam integrasi ekonomi. Namun, negara-

negara seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, yang memiliki aliansi keamanan dengan Amerika, harus menyeimbangkan hubungan mereka dengan Tiongkok tanpa mengorbankan kepentingan strategis mereka dengan Amerika.

## **BAB 3**

### **Analisis Faktor Pendorong Partisipasi Australia Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership**

Pada bab berikut akan menganalisa beberapa faktor yang mendorong partisipasi Australia dalam RCEP melalui kerangka pemikiran yang dikonsepsi oleh Woolcock (Woolcock, 2017b). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Woolcock telah menetapkan lima variabel yang dapat menjabarkan motif suatu negara dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi baru. Adapun variabel tersebut mencakup: (1) Kekuatan Ekonomi Relatif; (2) Rezim Internasional; (3) Kepentingan Negara; (4) Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik; dan (5) Faktor Ideasional. Berdasarkan pada kelima variabel tersebut, analisa akan dilakukan terhadap bagaimana Australia memformulasikan dan menjalankan kebijakan ekonominya dalam konteks RCEP, serta sejauh mana pendekatan diplomasi ekonomi baru tercermin dalam proses tersebut.

#### **3.1 Kekuatan Ekonomi Relatif**

Woolcock menjelaskan jika Kekuatan ekonomi relatif adalah sebuah kemampuan suatu negara untuk membentuk agenda dan mempengaruhi hasil negosiasi sangat bergantung pada ukuran negara atau perekonomian yang terlibat dalam proses tersebut (Woolcock, 2017b, p. 87). Negara dengan perekonomian besar umumnya memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi karena memiliki sumber daya finansial yang lebih besar. Hal ini memberikan mereka fleksibilitas dalam berinvestasi, memberikan bantuan, atau memfasilitasi kerja sama ekonomi yang menguntungkan pihak lain.

Selain itu, besarnya pasar domestik dari negara tersebut menjadikannya sangat menarik bagi negara-negara lain yang ingin menjalin hubungan dagang. Tawaran akses ke pasar besar ini memberikan kekuatan pasar tambahan bagi negara tersebut dalam proses negosiasi. Artinya, negara dengan ekonomi besar bisa menggunakan daya tarik pasarnya sebagai alat diplomasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan atau pengaruh tertentu. Negara-negara mitra yang ingin menikmati manfaat dari pasar tersebut cenderung akan lebih terbuka untuk menyetujui persyaratan yang diajukan (Baldwin, 2016).

Sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat di kawasan Asia-Pasifik, Australia memiliki kepentingan strategis untuk memperluas keterlibatannya dalam skema perdagangan regional yang dapat meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonominya. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi Australia menjadi elemen kunci yang memungkinkannya untuk tidak hanya ikut serta, tetapi juga berperan dalam membentuk arah kebijakan dan struktur dari RCEP itu sendiri. Australia memiliki posisi sebagai kekuatan ekonomi menengah yang strategis di kawasan Asia-Pasifik. Meskipun ukuran ekonominya tidak sebesar Tiongkok atau Jepang, Australia memiliki akses yang luas ke pasar utama di kawasan seperti Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN, yang secara kolektif menyumbang lebih dari 58% dari total perdagangan luar negeri Australia (DFAT, 2021).

Selain itu, Australia juga merupakan salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di dunia, serta memiliki struktur ekonomi yang sangat terdiversifikasi, mulai dari sektor jasa, pertambangan, pertanian, hingga pendidikan dan pariwisata. PDB nominal Australia pada tahun 2023 tercatat sebesar US\$1,7 triliun (World Bank, 2023), yang mana menjadikannya salah satu dari lima

ekonomi terbesar dalam RCEP (DFAT, 2021). Ukuran ekonomi ini memberikan Australia akses terhadap sumber daya finansial yang luas, hal tersebut memungkinkan Australia untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum ekonomi multilateral dengan kapasitas tawar yang relatif tinggi. Dalam proses negosiasi RCEP, kekuatan ekonomi Australia menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, termasuk dalam menetapkan aturan asal barang (*rules of origin*), mekanisme penyelesaian sengketa, serta standar kerja dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan domestiknya (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trades, 2021).

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang maju dalam kawasan Asia-Pasifik, Australia memegang peranan kunci dalam rezim perdagangan regional, termasuk dalam RCEP. Meskipun dari segi populasi penduduk Australia relatif lebih sedikit, namun GDP-nya termasuk posisi tertinggi di antara negara-negara anggota RCEP, dan volume perdagangannya sangat bergantung pada mitra kawasan seperti Tiongkok, Jepang Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN.

Posisi RCEP telah mencakup hampir 30% GDP global dan lebih dari sepertiga populasi penduduk dunia. Keterlibatan Australia dalam kesepakatan ini telah mencerminkan posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup signifikan, bukan hanya sebagai pengguna pasar, namun juga sebagai *co-creator* norma ekonomi kawasan regional. Data berikut menunjukkan bagaimana posisi ketergantungan yang bersifat timbal balik antara perdagangan dan skala ekonomi Australia yang dapat memperkuat kapasitas negosiasinya dalam kerangka RCEP.

**Tabel 1. Posisi dan Daya Tawar Australia dalam RCEP Berdasarkan Data Ekonomi**

No.	Indikator	Konteks Australia	Konteks RCEP	Sumber
1.	<b>GDP Nominal (2023)</b>	USD 1,729 triliun	Termasuk 1 dari 5 ekonomi terbesar di RCEP; memberi kekuatan dalam perumusan aturan dan prioritas sektor.	IMF World Economic Outlook, 2023; DFAT (2023)
2.	<b>Total Ekspor Australia ke RCEP (2022)</b>	AUD 278 miliar (sekitar 70% dari total ekspor Australia)	Menunjukkan ketergantungan tinggi Australia pada pasar regional, memperkuat insentif untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.	DFAT, <i>Trade and Investment at a Glance</i> , 2023
3.	<b>Total Impor dari Negara RCEP (2022)</b>	AUD 232 miliar	RCEP membantu mengurangi hambatan tarif dan memperkuat efisiensi rantai pasok impor Australia dari Asia Timur.	DFAT, 2023
4.	<b>Negara Tujuan Ekspor Terbesar di RCEP</b>	Tiongkok (34%), Jepang (10%), Korea Selatan (7%), ASEAN (15%)	Negara-negara ini adalah mitra strategis Australia dalam komoditas, energi, dan jasa.	DFAT, Country and Commodity Trade Data, 2022
5.	<b>Proporsi Perdagangan Australia dengan RCEP</b>	>58% dari total perdagangan barang dan jasa Australia	Australia sangat terdampak oleh dinamika ekonomi kawasan, menjadikannya berkepentingan dalam penguatan tata kelola regional.	DFAT, 2021
6.	<b>Posisi Australia dalam RCEP (GDP Share)</b>	~6.6% dari total GDP gabungan RCEP	Memiliki bobot ekonomi menengah yang substansial dalam kelompok; cukup berpengaruh dalam proses negosiasi.	Petri & Plummer (2020), Brookings Institution
7.	<b>Keunggulan Sektoral Australia</b>	Pertanian (daging sapi, gandum), Energi (LNG), Pendidikan Tinggi, Jasa Keuangan	Sektor-sektor ini difasilitasi oleh liberalisasi RCEP, memperkuat posisi Australia dalam menetapkan prioritas negosiasi.	Ravenhill (2020); DFAT Sectoral Briefs
8.	<b>Peran dalam Negosiasi RCEP</b>	Australia aktif mendorong liberalisasi jasa dan e-commerce serta penguatan rules of origin	Berperan sebagai <i>rule-shaper</i> , bukan hanya pengikut.	DFAT RCEP Negotiation Brief, 2020

Selain ukuran ekonomi, daya tarik pasar Australia juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks RCEP. Australia telah mengekspor barang sebesar 75% yang mana di antaranya Tiongkok sebesar 32,6%, Jepang sebesar 9,3%, Korea Selatan sebesar 6,5%, dan ASEAN sebesar 11,7% yang mana negara-negara tersebut merupakan mitra utama dari Australia (DFAT, 2022)

Sebagai pasar konsumsi kelas menengah yang terus tumbuh dan dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi, Australia menjadi mitra dagang yang diincar

oleh banyak negara di kawasan. Hal ini memberinya *leverage* dalam negosiasi karena keberadaannya dalam RCEP memberikan keuntungan strategis bagi negara mitra. Keterlibatan Australia dalam RCEP bukan hanya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi ekspor barang dan jasa domestiknya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat integrasi ekonomi regional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Australia memiliki posisi yang tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan pada perdagangan eksternal dalam kerangka ekonomi Asia-Pasifik, khususnya kaitannya dengan negara-negara Asia Timur dan ASEAN. Sebagai negara dengan populasi penduduk yang rendah, namun Australia dapat memberikan surplus pada bidang ekspor, yang mana hal tersebut membuka akses pada pasar regional dengan menggantungkan pertumbuhannya terutama pada komoditas-komoditas seperti batubara, bijih besi, daging, gas alam cair, serta jasa pendidikan hingga keuangan.

Kaitannya dengan perjanjian RCEP, dapat ditelusuri melalui data proporsi ekspor yang menunjukkan tingginya keterhubungan Australia dengan Asia Timur. Hal tersebut menjadikan Australia bukan hanya sebagai mitra dagang, namun juga sumber utama daya tawar dalam negosiasi kerja sama ekonomi. Australia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas, akuntabel, dan transparansi terhadap aturan perdagangan kawasan. Hal tersebut dapat ditinjau dari tabel berikut yang menjelaskan keterkaitan proporsi ekspor Australia ke Asia Timur dan ASEAN rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2023.

**Tabel 2. Proporsi Ekspor Australia ke Asia Timur dan ASEAN (2022–2023)**

No.	Negara / Kawasan	Nilai Ekspor (AUD miliar)	Persentase terhadap Total Ekspor Australia	Komoditas Utama yang Diekspor	Relevansi terhadap Posisi & Daya Tawar Australia	Sumber
1.	<b>Tiongkok</b>	178,3	33,9%	Bijih besi, LNG, batu bara, pendidikan, barang pertanian	Mitra dagang terbesar; RCEP memperkuat kepastian akses pasar	DFAT, <i>Trade and Investment at a Glance</i> , 2023
2.	<b>Jepang</b>	53,5	10,2%	Gas alam cair (LNG), batu bara, daging, bahan baku	Akses pasar energi jangka panjang, Jepang mitra strategis RCEP.	DFAT, <i>Trade and Investment at a Glance</i> , 2023
3.	<b>Korea Selatan</b>	29,4	5,6%	LNG, batubara, daging, produk kimia	Kawasan penting bagi ekspor energi dan pertanian Australia.	DFAT, <i>Trade and Investment at a Glance</i> , 2023
4.	<b>ASEAN (10 negara)</b>	40,8	7,7%	Mesin, pendidikan, pertanian, logam dasar, jasa keuangan	Kawasan dengan pertumbuhan cepat; RCEP membuka peluang integrasi produksi dan digitalisasi.	DFAT ASEAN Strategy Paper, 2022
<b>Total Asia Timur + ASEAN</b>		302,0	57,4%	–	Menunjukkan lebih dari setengah ekspor Australia ke kawasan mitra RCEP.	Kompilasi dari DFAT, ABS (2023)
<b>Total Ekspor Australia</b>		526,1	100%	–	Asia Timur adalah jantung perdagangan Australia, memperkuat posisi tawar di RCEP dan sekitarnya.	ABS (Australian Bureau of Statistics), 2023

Variabel kekuatan ekonomi relatif juga bersandar pada kondisi di mana negara-negara maju cenderung memiliki kapasitas administratif yang lebih unggul, yang memungkinkan mereka menjalankan diplomasi ekonomi secara lebih efektif. Pada konteks Australia, institusi pemerintah seperti Departemen Perdagangan dan Urusan Luar Negeri (DFAT), lembaga riset ekonomi, serta keterlibatan sektor swasta dalam proses konsultatif kebijakan, menjadi kekuatan penunjang dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data dan analisis strategis. Delegasi Australia dalam RCEP didukung oleh kapasitas teknokratik tinggi dan advokasi terhadap

transparansi serta standar aturan dalam forum perundingan (DFAT, 2019) (Wilson, 2022). Kemampuan ini menjadikan Australia mampu memahami dengan mendalam dinamika RCEP dan merancang strategi negosiasi yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi global (Armstrong & Drysdale, 2022).

Berdasarkan rezim ekonomi RCEP, daya tawar suatu negara sangat dipengaruhi oleh ukuran pasar (*market size*), baik dari segi GDP, populasi penduduk, maupun keterlibatan suatu negara dalam arus perdagangan regional. Walaupun Australia bukan negara dengan populasi penduduk terbesar, namun ia memiliki GDP per kapita yang cukup tinggi, stabilitas ekonomi makro, dan sektor unggulan seperti energi, pertanian, pendidikan, serta jasa keuangan yang membuat Australia memiliki peranan penting dalam blok ini. RCEP terdiri dari 15 negara dengan tingkat dan ukuran ekonomi pasar yang variatif. Melalui pendekatan perbandingan *market size* Australia dengan negara-negara mitra, kita dapat melihat posisi Australia secara strategis, serta bagaimana Australia dapat memanfaatkan keunggulan sektoral serta kapasitas institusinya dalam proses perundangan serta implementasi kebijakan-kebijakan dan perjanjian RCEP. Berdasarkan data pada tabel berikut terdapat perbandingan *market size* antara Australia dengan negara-negara mitra dari RCEP pada tahun 2023.

**Tabel 3. Perbandingan Market Size Australia vs Negara Mitra RCEP (2023)**

No.	Negara	GDP (US\$ triliun)	Populasi (juta jiwa)	GDP per Kapita (US\$)	Proporsi GDP dalam RCEP (%)	Keterangan Daya Tawar	Sumber
1.	<b>Australia</b>	1,73	26,5	65.300	~6,6%	Ekonomi maju, sektor jasa dominan, kekuatan normatif dalam negosiasi.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
2.	<b>Tiongkok</b>	17,7	1.410	12.500	~67%	Pemimpin ekonomi kawasan; kekuatan dominan dalam RCEP.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
3.	<b>Jepang</b>	4,2	125,1	33.600	~16%	Ekonomi besar, berteknologi tinggi; mitra utama Australia.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
4.	<b>Korea Selatan</b>	1,7	51,7	33.000	~6,4%	Mitra ekonomi penting, terutama energi dan digital.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
5.	<b>Indonesia</b>	1,4	278,7	5.000	~5,2%	Populasi besar, ekonomi berkembang pesat di ASEAN.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
6.	<b>Vietnam</b>	415 miliar	98,5	4.200	~1,6%	Basis produksi industri dan digitalisasi cepat.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
7.	<b>Thailand</b>	505 miliar	70,3	7.200	~2,0%	Mitra dagang utama untuk pertanian dan logistik.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
8.	<b>Malaysia</b>	440 miliar	33,5	13.100	~1,7%	Partner kunci dalam rantai pasok teknologi dan energi.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
9.	<b>Filipina</b>	410 miliar	113,9	3.600	~1,6%	Pasar ekspansi jasa dan digital bagi Australia.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
10.	<b>Singapura</b>	500 miliar	5,9	85.000	~2,0%	Negara kecil tapi strategis sebagai hub jasa dan perdagangan.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
11.	<b>Selandia Baru</b>	253 miliar	5,1	49.600	~1,0%	Mitra dekat Australia secara ekonomi dan politik.	IMF WEO, World Bank, DFAT (2023)
<b>RCEP Total</b>		~26,5 triliun	~2,3 miliar	–	100%	RCEP mewakili pasar terbesar dunia secara agregat.	DFAT & ASEAN Secretariat, 2023

Lebih jauh lagi, keterlibatan Australia dalam RCEP juga memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen untuk

memperkuat posisi politik di kawasan. Dengan menjadikan RCEP sebagai platform untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi Tiongkok, Australia menunjukkan bahwa partisipasinya bukan hanya soal manfaat ekonomi semata, tetapi juga soal strategi geopolitik yang lebih luas. Komitmen Australia terhadap isu perubahan iklim, seperti *net zero target* pada tahun 2050 serta pendanaan iklim bagi negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik, turut memperluas pengaruh ekonominya melalui diplomasi bantuan (Ryan Neelam, 2023). Hal ini sejalan dengan pendekatan dalam diplomasi ekonomi yang melihat bahwa ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan, terutama dalam tatanan global yang semakin saling tergantung.

Dalam kajian literatur, (Ravenhill, 2017b) menekankan bahwa kekuatan ekonomi relatif menentukan kemampuan sebuah negara dalam mengatur hasil dari negosiasi ekonomi internasional. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar tidak hanya mampu mendefinisikan norma dan regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membentuk koalisi, mempengaruhi proses lobi, dan bahkan mendikte agenda negosiasi. Dalam hal ini, Australia memanfaatkan posisi ekonominya yang relatif kuat untuk mengarahkan sejumlah klausul dalam RCEP yang menguntungkan kepentingan industrinya, termasuk sektor energi, pertanian, dan pendidikan tinggi.

Australia juga memiliki sebuah akses yang cukup luas terhadap berbagai pemangku kepentingan domestik dan regional yang mendukung proses diplomasi ekonominya. Australia tercatat memiliki Produk Domestik Bruto nominal sebesar US \$1,728 triliun, menjadikannya salah satu dari lima ekonomi terbesar dalam perjanjian RCEP dan memberikan bobot tawar yang substansial dalam negosiasi aturan dan kebijakan blok tersebut (DFAT, 2022). Selain itu, RCEP mencakup

ekonomi dengan total GDP sekitar US \$26,3 triliun dan aliran perdagangan senilai US \$532,6 miliar dengan Australia pada tahun 2019, mencerminkan betapa pentingnya Australia sebagai pemain utama di kawasan. Keberadaan pasar dan kapasitas finansial ini memberi Australia *leverage* signifikan dalam penetapan klausul seperti *rules-of-origin* dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Keterlibatan asosiasi bisnis, lembaga swadaya masyarakat, universitas, serta sektor industri dalam penyusunan strategi kebijakan luar negeri memperkuat legitimasi dan kualitas posisi negosiasinya. Masukan dari berbagai pihak ini memungkinkan Australia mengambil kebijakan yang tidak hanya berbasis kalkulasi ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan politik secara menyeluruh. Australia menghadapi tensi signifikan dalam ratifikasi RCEP, terlihat dari kritik tajam dari serikat buruh terbesar, ACTU, yang memperingatkan bahwa "RCEP akan melegitimasi junta militer di Myanmar" dan menegaskan bahwa perjanjian tersebut "gagal memberikan manfaat kepada pekerja Australia" serta tidak mencantumkan standar tenaga kerja atau hak asasi (Australian Council of Trade Union 2021). Pemerintah Australia, di sisi lain, tetap bersikeras bahwa ratifikasi RCEP dengan menetapkan instrumen ratifikasi pada 2 November 2021 merupakan langkah penting dalam memperkuat akses pasar dan stabilitas ekonomi regional. Tensi ini menggambarkan dilema antara kepentingan ekonomi jangka panjang dan tekanan domestik untuk menjaga nilai-nilai sosial dan etika.

Kapasitas negosiasi suatu negara sangat menentukan posisi dan daya tawarnya dalam kerangka rezim ekonomi RCEP. Kapasitas ini mencakup jumlah dan pengalaman perwakilan dalam forum, dukungan teknis dan analitis dari institusi pemerintah, serta kemampuan untuk mengakses riset yang bersandar pada bukti

konkret. Australia merupakan salah satu negara dengan kapasitas negosiasi yang mumpuni dalam cakupan kawasan. Dengan dukungan dari lembaga teknis seperti DFAT, *Productivity Commission*, Austrade, dan tradisi panjang dalam organisasi perdagangan global (WTO, APEC, dan CPTPP), Australia dikenal sebagai peran dan aktor teknokrat normatif yang berpengaruh meskipun tidak termasuk ke dalam negara dengan *market size* terbesar.

**Tabel 4. Statistik Kapasitas Negosiasi Australia dan Daya Tawar Regionalnya**

No.	Komponen	Rincian Australia	Relevansi terhadap Posisi dan Daya Tawar	Sumber
1.	<b>Jumlah Delegasi RCEP (estimasi)</b>	± 65 orang, termasuk negosiator utama, ahli hukum dagang, dan analis sektor jasa	Menunjukkan komitmen dan kapasitas teknis tinggi dalam proses perundingan regional	DFAT RCEP Briefing Notes, 2021
2.	<b>Negara Asal Lembaga Pendukung</b>	DFAT (Departemen Luar Negeri & Perdagangan), Austrade, Productivity Commission	Memberi dukungan substansi dan data teknis kepada delegasi	DFAT.gov.au; Productivity.gov.au
3.	<b>Forum Multilateral Aktif</b>	WTO, APEC, CPTPP, OECD, RCEP	Keterlibatan aktif di berbagai forum memperkuat reputasi Australia sebagai pemimpin teknis dan diplomatik	WTO TPR Australia Report, 2021
4.	<b>Kapasitas Analisis Kebijakan Perdagangan</b>	Tinggi: Australia menggunakan analisis berbasis data, model ekonomi, dan konsultasi stakeholder domestik	Memberi posisi tawar berbasis fakta dan efisiensi mampu menavigasi isu kompleks (e-commerce, jasa, dsb.)	Institute for International Trade (2020), University of Adelaide
5.	<b>Koordinasi Antar Kementerian</b>	Terintegrasi antara DFAT, Treasury, Kementerian Perdagangan, dan sektor swasta	Koordinasi yang solid memberi stabilitas posisi nasional dalam negosiasi	Ravenhill, J. (2020). <i>Australia and Economic Regionalism</i>
6.	<b>Pengalaman dalam Negosiasi FTA</b>	Lebih dari 16 FTA aktif, termasuk dengan China, Jepang, Korea, ASEAN, AS, Selandia Baru, Singapura, dll.	Memberikan kredibilitas dan kesiapan dalam negosiasi kompleks seperti RCEP	DFAT: Australia's Trade Agreements Overview
7.	<b>Fokus Negosiasi di RCEP</b>	Perdagangan jasa, investasi, e-commerce, penyelesaian sengketa, rules of origin	Australia menjadi <i>norm entrepreneur</i> dalam isu digital dan jasa pendidikan	DFAT, 2021; Petri & Plummer (2020)
8.	<b>Kolaborasi Akademik &amp; Riset Independen</b>	University of Adelaide, ANU, Lowy Institute, East Asia Forum	Riset dan data mendalam memperkuat posisi substansial dalam isu strategis dan teknis	Institute for International Trade (2020), Lowy Institute Reports

Berdasarkan data berikut, dapat ditinjau bahwa Australia dalam hubungannya dengan kapasitas negosiasi dalam RECP memiliki keunggulan baik dari segi jumlah delegasi, pengalaman, hingga kolaborasi akademik dan lembaga riset independen. Data tersebut menunjukkan bahwa Australia memiliki kapasitas dan daya tawar yang tinggi dalam pengaruhnya di RCEP.

Bergabungnya Australia dalam RCEP menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya menjadi faktor penentu dalam keterlibatan internasional, tetapi juga instrumen utama dalam membentuk arsitektur kerja sama ekonomi global. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi relatif -nya, Australia tidak sekadar menjadi peserta pasif dalam dinamika regional, tetapi justru tampil sebagai aktor penting yang mempengaruhi arah dan isi dari perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi bukan hanya soal besaran angka PDB, melainkan juga mencakup kemampuan administratif, kapasitas strategis, dan keberlanjutan sistem pengambilan kebijakan yang berbasis pengetahuan dan keterlibatan kolektif (Baldwin, 2016).

Australia menggunakan kekuatannya sebagai alat diplomasi untuk memperkuat posisi regionalnya melalui RCEP. Kebijakan ini tidak hanya mempertegas komitmen Australia terhadap integrasi ekonomi kawasan, tetapi juga mencerminkan strategi jangka panjang dalam menghadapi perubahan global yang semakin kompleks dan multipolar. Isu perubahan iklim merupakan instrumen utama dalam ranah diplomasi regional bagi Australia. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap krisis iklim, Australia mencoba untuk memanfaatkan isu bukan hanya sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan, namun juga sebagai *leverage tool* diplomatik di area kawasan, terutama Asia Tenggara dan Pasifik.

Komitmen Australia melalui bantuan iklim, investasi *green-infrastructure*, dan partisipasi aktif dalam forum internasional menunjukkan bahwa Australia ingin dipandang bukan hanya sebagai negara pendonor, namun juga sebagai kekuatan normatif (*normative power*).

**Tabel 5. Kontribusi Australia terhadap Isu Perubahan Iklim (2019–2023)**

No.	Tahun	Program / Inisiatif	Nilai (AUD)	Cakupan Regional	Tujuan / Fokus	Dampak terhadap Daya Tawar	Sumber
1.	2019–2020	Climate and Disaster Resilience Program (Pasifik)	AUD 300 juta (2016–2020)	Negara-negara Pasifik	Infrastruktur tahan iklim, manajemen risiko bencana	Meneguhkan posisi Australia sebagai donorer utama iklim di Pasifik	DFAT, 2019. Link
2.	2020–2025	Komitmen Iklim Global (COP26)	AUD 2 miliar baru	Global, fokus: Pasifik & Asia Tenggara	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Memperkuat legitimasi Australia dalam forum multilateral, seperti COP dan APEC	DFAT, 2021; Guardian, 2021
3.	2020–2023	Pacific Infrastructure Financing Partnership	≥ AUD 350 juta	Negara-negara kepulauan Pasifik	Proyek energi terbarukan dan air bersih	Memperluas pengaruh ekonomi dan politik di Pasifik	ADB & DFAT Joint Statement, 2022
4.	2020–2023	Australian Climate Finance Partnership (ACFP, via ADB)	AUD 140 juta	Asia Tenggara & Asia Selatan	Investasi swasta untuk infrastruktur hijau	Menunjukkan kepemimpinan Australia dalam menghubungkan sektor publik-swasta di kawasan	ADB News, 2023
5.	2022–2023	Climate Finance Disbursement (Estimasi “Fair Share”)	AUD 619 juta	Regional dan global	62% untuk adaptasi, 38% untuk mitigasi	Walau di bawah “fair share”, tetap unggul dibandingkan beberapa donorer OECD lainnya di Asia	Oxfam Australia, 2023; Climate

Data berikut menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2023, Australia telah aktif di beberapa program mengenai lingkungan. Australia telah menggelontorkan sejumlah dana guna mendukung program-program lingkungan demi terwujudnya ketahanan dan daya tawar dalam area kawasan Asia Tenggara – Pasifik.

### 3.2 Rezim Internasional

Organisasi RCEP dapat dipahami sebagai sulaman ulang atas peta ekonomi Asia – Pasifik, yang dijahit dari fragmen-fragmen kerja sama yang sebelumnya sempat tercerai berai. Pada saat Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017 merupakan sebuah langkah yang mengguncang fondasi struktur ekonomi liberal di kawasan, sehingga terjadi posisi vakum. Dunia mulai menatap Asia, namun tanpa keterlibatan Amerika Serikat. TPP menjadi bayang-bayang ambisi yang tidak tuntas, oleh karenanya RCEP hadir sebagai upaya kolektif negara-negara Asia beserta mitranya untuk membentuk rezim ekonomi regional yang bersifat inklusif, berbasis konsensus, dan merepresentasikan kepentingan Asia secara lebih otentik. RCEP sebagai rezim internasional tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya, tetapi juga menampilkan suatu kerangka kerja kolektif yang membimbing perilaku negara dalam sistem perdagangan regional dan global. Dalam konteks ini, keberadaan RCEP sebagai instrumen kerja sama multilateral menantang asumsi dasar teori stabilitas hegemonik yang menyatakan bahwa kerja sama internasional hanya dapat bertahan jika ada satu negara dominan yang bertindak sebagai pemimpin atau "hegemoni". Justru, RCEP muncul dan berkembang dalam konteks ketidakhadiran aktor hegemonik tunggal, dengan Amerika Serikat yang tidak ikut serta dalam perjanjian ini, serta dominasi ekonomi China yang belum sepenuhnya diterima sebagai kekuatan hegemon oleh semua negara anggota (United Nation ESCAP, 2019).

Alih-alih mengandalkan kepemimpinan yang hegemonik dan tunggal seperti AS, RCEP mencerminkan pola kerja sama horizontal dengan melibatkan 15 negara

dari ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru yang mana tergabung dalam sebuah kerangka institusional yang telah menyatukan 30% PDB dunia dan hampir sepertiga populasi penduduk dunia. Rezim ini, meski belum memiliki ambisi besar seperti TPP, namun dalam hal standar regulasi justru lebih realistis dan adaptif terhadap heterogenitas kawasan (A Peter et al., 2020)

Dalam konteks ini, Australia berpandangan bahwa RCEP bukan hanya sebagai kesepakatan dagang, namun sebagai pintu gerbang strategis menuju keterlibatan aktif dalam penyusunan norma ekonomi regional. Pada saat arsitektur liberal mengalami disorientasi global, kemudian RCEP menjelma sebagai rumah baru yang menawarkan stabilitas, keberlanjutan, dan legitimasi institusional yang disusun serta dibangun dalam kawasan, tanpa campur tangan dari luar.

Variabel rezim memberikan kerangka teoritis yang tepat untuk memahami dinamika ini. Rezim internasional dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, prinsip, dan prosedur kebijakan yang disepakati bersama oleh negara-negara untuk mengatur interaksi mereka dalam isu-isu tertentu. Dalam hal ini, RCEP membentuk sebuah rezim perdagangan yang menyediakan kepastian, stabilitas, dan prediktabilitas bagi negara-negara anggotanya, termasuk Australia. Negara-negara tidak hanya terikat pada insentif ekonomi, tetapi juga pada norma-norma yang diatur dalam perjanjian, seperti prinsip non-diskriminasi, liberalisasi perdagangan, dan penyelesaian sengketa secara kolektif.

Preambule dan pasal-pasal utama dalam teks resmi RCEP menegaskan prinsip-prinsip tersebut, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, dan e-commerce sebagai elemen utama rezim (ASEAN Secretary, 2020). Dengan demikian, rezim ini membentuk ekspektasi bersama mengenai perilaku yang dianggap sah dalam

hubungan ekonomi internasional. RCEP merupakan bentuk manifestasi dari rezim ekonomi kawasan modern yang dibentuk berdasarkan konsensus dan kepentingan kolektif negara-negara Asia-Pasifik. Sebagai rezim ekonomi, RCEP bukan hanya sekadar perjanjian perdagangan, namun merupakan perangkat kelembagaan yang membentuk norma, aturan, serta mekanisme tata kelola dalam hubungan ekonomi antar-negara anggotanya.

Perwujudan fungsi-fungsi rezim ini dapat ditelaah melalui preambule dan pasal-pasal utama dalam naskah resmi RCEP yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kerja sama ekonomi seperti keterbukaan pasar, transparansi regulasi, liberalisasi jasa, perlindungan investasi, dan fasilitasi rantai pasok. Australia, merupakan salah satu negara penandatangan dengan pandangan bahwa RCEP merupakan ruang strategis untuk memperkuat integrasi kawasan, memperluas akses pasar pada sektor-sektor unggulannya, serta turut andil dalam penyusunan peraturan perdagangan digital (*e-commerce*).

**Tabel 6. RCEP sebagai Rezim Ekonomi Regional dan Alasan Australia Bergabung**

No.	Komponen	Isi Utama / Fungsi sebagai Rezim	Relevansi bagi Australia	Sumber
1.	<b>Preamble</b>	Menekankan integrasi ekonomi, keterlibatan dalam rantai pasok global, sistem perdagangan terbuka dan berbasis aturan ( <i>rules-based order</i> ).	Australia mendukung multilateralisme dan tata ekonomi berbasis aturan, sekaligus memperluas pengaruh regional.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
2.	<b>Pasal 1.1</b>	Mendirikan RCEP sebagai <i>Free Trade Area</i> resmi di bawah WTO.	Memberi landasan legal untuk liberalisasi perdagangan regional yang Australia butuhkan untuk ekspor komoditas dan jasa.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
3.	<b>Pasal 1.3</b>	Menyatakan tujuan: modern, berkualitas tinggi, saling menguntungkan, memperkuat arsitektur perdagangan regional.	Australia mendukung perjanjian berkualitas tinggi dengan fleksibilitas untuk mempertahankan kepentingan domestik.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
4.	<b>Chapter 2</b>	Aturan perdagangan barang: penghapusan tarif, standar teknis, fasilitasi perdagangan, dan transparansi.	Sektor ekspor pertanian Australia (daging, gandum, anggur) diuntungkan oleh penghapusan tarif dan hambatan teknis.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
5.	<b>Chapter 3</b>	<i>Rules of Origin</i> : memudahkan akumulasi asal barang antar anggota untuk menikmati preferensi tarif.	Mendukung industri dan ekspor Australia untuk mengintegrasikan rantai pasok regional.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
6.	<b>Chapter 8</b>	Liberalisasi perdagangan jasa, termasuk pendidikan, keuangan, asuransi, dan profesional.	Memperkuat sektor jasa unggulan Australia—termasuk universitas dan jasa keuangan—di pasar Asia.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
7.	<b>Chapter 12</b>	Aturan e-commerce: perlindungan konsumen, aliran data lintas negara, larangan tarif pada produk digital.	Australia aktif menyusun norma digital regional, mendorong kepastian hukum dan akses pasar digital.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
8.	<b>Chapter 17</b>	Ketentuan pengecualian: negara boleh mempertahankan kebijakan publik untuk keamanan, lingkungan, kesehatan.	Memungkinkan Australia menjaga standar lingkungan dan kesehatan domestik tanpa melanggar komitmen.	<a href="#">DFAT, 2021</a>
9.	<b>Chapter 18–19</b>	Institusi dan penyelesaian sengketa: pembentukan komite pengawas, prosedur konsultasi, dan mekanisme penyelesaian antar negara.	Memberi kepastian dan transparansi dalam menyelesaikan konflik dagang atau penafsiran antar anggota.	<a href="#">DFAT, 2021</a>

Berdasarkan data berikut, dapat ditemukan fakta bahwa RCEP memberikan peluang strategis bagi Australia untuk memperluas integrasi ekonomi dan pengaruh regional, khususnya pada kawasan Asia-Pasifik. Dengan mengedepankan prinsip *free trade* berbasis aturan, RCEP telah memberikan landasan hukum yang mendukung kepentingan ekspor barang dan jasa Australia terutama pada sektor pertanian, pendidikan, dan keuangan. Ketentuan mengenai *Rules of Origin* dan e-

*commerce* semakin memperkuat posisi Australia dalam rantai pasok regional dan ekonomi digital (Wilson, 2022).

RCEP sebagai peluang strategis untuk memperkuat integrasi ekonominya dengan kawasan Asia-Pasifik yang dinamis. Kawasan ini mencakup mitra dagang utama Australia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN, yang secara kolektif menyumbang lebih dari 58 persen dari total perdagangan Australia (DFAT, 2021c). Dalam konteks ini, partisipasi Australia dalam RCEP tidak hanya berfungsi sebagai upaya memperluas akses pasar, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat keterikatannya dengan rezim regional yang berkembang. Komitmen terhadap RCEP menunjukkan bahwa Australia mendukung pembentukan dan pelestarian aturan bersama dalam tatanan ekonomi kawasan.

Lebih jauh, keterlibatan Australia dalam RCEP mencerminkan transisi dari pendekatan bilateral menuju pendekatan multikulturalisme berbasis institusi. Dalam studi rezim internasional, institusionalisme liberal menjelaskan bahwa negara bersedia bekerja sama dalam kerangka multilateral ketika aturan dan norma bersama dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan transparansi, dan menurunkan biaya transaksi. RCEP menyediakan struktur formal seperti mekanisme harmonisasi aturan asal barang (*rules of origin*), standardisasi prosedur bea cukai, dan perlindungan terhadap investasi asing, yang semuanya meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat kohesi antara negara anggota (Baldwin, 2016). Pada konteks ini, Australia mendukung prinsip integrasi bertahap, selain itu sifat inklusivitas dari RCEP yang membedakan dari CPTPP

yang memiliki standar lebih tinggi dalam isu-isu ketenagakerjaan dan lingkungan (Ravenhill, 2017).

Australia, dengan kapasitas administratif dan kelembagaan yang tinggi, berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan keuntungan dari struktur ini secara maksimal. Selain itu, Australia berpandangan bahwa RCEP juga memiliki dampak normatif terhadap perilaku negara anggota. Australia tidak hanya menjadi penerima manfaat ekonomi dari perjanjian ini, tetapi juga ikut serta dalam pembentukan aturan dan norma. Studi menunjukkan bahwa Australia memiliki kapasitas teknis yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan terhadap isu-isu sensitif, serta memperkuat norma perdagangan digital dan standar teknis di kawasan (Kassam, 2021).

Proses negosiasi RCEP memberikan ruang bagi Australia untuk mempengaruhi arah dan isi dari kebijakan regional, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan investor, serta isu keberlanjutan dan lingkungan. Dengan keterlibatan aktif dalam proses tersebut, Australia memperkuat posisinya sebagai aktor normatif dalam sistem internasional yang tidak lagi bergantung pada kekuatan hegemon Tunggal (Adila & Suryadipura, 2023).

Dalam perspektif jangka panjang, keberadaan RCEP juga memperlihatkan bagaimana rezim internasional dapat berperan sebagai mekanisme adaptif yang menanggapi perubahan dalam struktur kekuasaan global (Krasner, 1983). Ketika Amerika Serikat mundur dari kesepakatan seperti Trans-Pacific Partnership (TPP), banyak pihak meragukan kelangsungan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik. Namun, pembentukan dan berfungsinya RCEP menunjukkan bahwa negara-negara dapat tetap membentuk rezim yang stabil tanpa keberadaan hegemon yang

dominan. Hal tersebut menunjukkan bahwa literatur regionalisme fungsional yang melihat ASEAN dan Tiongkok sebagai katalis utama dalam pembentukan RCEP, bukan sebagai dominasi tunggal (Dent, 2021).

Dalam hal ini, Australia menunjukkan bahwa kepentingan nasionalnya dapat dicapai melalui partisipasi dalam rezim yang bersifat kolektif, dengan dukungan dari norma dan prosedur yang telah di institusionalisasi (Buzan, 1985).

Bergabungnya Australia dalam RCEP dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap dinamika struktur internasional yang terus berubah. Melalui teori rezim, kita dapat melihat bahwa negara-negara seperti Australia memilih untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam arsitektur ekonomi regional yang berbasis pada aturan, bukan hanya pada kekuatan material. RCEP, sebagai manifestasi dari rezim internasional, menjadi sarana bagi negara anggota untuk mengejar stabilitas, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi secara kolektif, meskipun dalam situasi yang tidak sepenuhnya ditopang oleh kekuatan hegemonik tunggal.

Australia menunjukkan konsensus kuat dalam integrasinya ke dalam RCEP, dimana 9 dari 14 mitra dagangnya yang merupakan anggota RCEP menyumbang 58% dari total perdagangan dua arah Australia dan 67% dari ekspor nasional (DFAT, 2021). Hal ini menggaris bawahi bahwa partisipasi Australia tidak sekadar simbolik, melainkan didorong oleh konsensus pragmatis di antara pelaku domestik dan internasional. Namun, partisipasi tersebut tidak terlepas dari kritik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh yang tergabung seperti AFTINET menyoroti kekhawatiran mengenai proses negosiasi yang tertutup dan tidak partisipatif. Mereka mengkritik potensi dampak RCEP terhadap regulasi domestik,

termasuk pada sektor pelayanan publik dan perlindungan tenaga kerja (DFAT, 2021c)

Dukungan terhadap RCEP ini terlihat jelas dalam laporan Pemerintah Australia (DFAT) dan HSBC, yang menyatakan bahwa perjanjian ini membuka peluang integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai pasok Asia-Pasifik dan memperkokoh stabilitas ekonomi regional

Namun hal ini tidak lepas dari kritik dari publik mereka, berbagai serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil di Australia, seperti Australian Fair Trade and Investment Network (AFTINET), mengkritik RCEP karena proses negosiasi yang dianggap “terlalu rahasia” dan minim partisipasi publik, serta beresiko membatasi negara dalam mengatur sektor publik, terutama pelayanan kesehatan dan perawatan lansia (Australian Government 2020; Minister for Foreign Affairs Minister for Women Senator 2021). Mereka menuntut transparansi lebih besar dan studi dampak independen, menyatakan keprihatinan bahwa perjanjian ini “membekukan” kedaulatan regulasi domestik dan tidak memasukkan standar hak tenaga kerja maupun lingkungan.

### **3.3 Kepentingan Negara**

Dorongan utama bagi Australia untuk bergabung dalam RCEP berasal dari aktor-aktor domestik yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung terhadap ekspansi pasar, terutama pelaku ekspor pada sektor pertanian, jasa profesional, dan pendidikan tinggi. sektor pertanian melalui organisasi *National Farmer's Federation* (NFF) melihat RCEP sebagai peluang yang strategis untuk meningkatkan akses pasar Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN yang menjadi

tujuan ekspor utama produk daging, gandum, dan komoditas pertanian lainnya. Demikian pula sektor pendidikan tinggi yang diwakili oleh *Group of Eight*, menekankan pentingnya liberalisasi jasa pendidikan guna mempertahankan daya saing global universitas Australia. Hal tersebut dianggap merupakan landasan penting untuk memperkuat posisi Australia sebagai penyedia jasa unggulan.

Selain dorongan ekonomis, kebijakan Australia untuk bergabung dengan RCEP juga dilandasi oleh pertimbangan politik strategis. Pemerintah Australia memandang keterlibatannya dalam RCEP sebagai bentuk komitmen terhadap kerangka regional yang terbuka dan berbasis aturan, sekaligus sebagai cara untuk menjaga relevansi geopolitik Australia di kawasan yang semakin didominasi oleh kekuatan Asia Timur (Wilson, 2022).

**Tabel 7. Indikator Kepentingan (Interests) – Australia dan RCEP**

No.	Jenis Data	Hasil Analisis	Sumber
1.	Pernyataan dari asosiasi bisnis (Ai Group, NFF, Group of Eight)	Australian Industry Group (Ai Group) dan National Farmers' Federation (NFF) mendukung RCEP karena potensi peningkatan ekspor. Group of Eight menyatakan bahwa liberalisasi sektor jasa pendidikan akan memperkuat daya saing universitas Australia di Asia.	Ai Group (2020); NFF (2020); Group of Eight Australia (2020)
2.	Laporan konsultasi publik DFAT	DFAT menerima banyak masukan positif dari pelaku usaha dan institusi pendidikan yang menekankan pentingnya akses pasar ke Asia. Proses konsultasi digunakan untuk menyusun posisi negosiasi Australia	DFAT (2019). RCEP Negotiation Stakeholder Consultations Summary Report
3.	Analisis distribusi manfaat antar sektor	Studi menunjukkan bahwa sektor pertanian dan jasa mendapat manfaat lebih besar dari RCEP, sementara sebagian sektor manufaktur bersikap lebih hati-hati terhadap liberalisasi yang cepat.	Centre for International Economics (CIE) (2021); Ravenhill (2021)
4.	Opini publik atau survei elite tentang integrasi ekonomi	Survei elite kebijakan menunjukkan dukungan kuat terhadap integrasi ekonomi regional, meskipun terdapat kekhawatiran tentang dominasi Tiongkok dalam RCEP.	Lowy Institute Poll (2021); Wilson (2022)
5.	Data ekspor sektor utama (daging, pendidikan, jasa)	Ekspor daging sapi Australia ke Tiongkok bernilai lebih dari AUD 2 miliar per tahun. Sektor pendidikan menghasilkan lebih dari AUD 40 miliar sebelum pandemi. Jasa profesional mengalami peningkatan permintaan dari Asia.	DFAT (2022); ABS (2023); Austrade (2020)

Berdasarkan data pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa terdapat dukungan luas dari berbagai *stakeholders* terhadap keikutsertaan Australia dalam RCEP. Analisis distribusi manfaat menunjukkan keuntungan signifikan bagi sektor pertanian dan jasa, meskipun sektor manufaktur lebih berhati-hati. Survei elit kebijakan mengungkapkan dukungan kuat terhadap integrasi regional meski terdapat kekhawatiran atas dominasi Tiongkok. Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam sektor ekspor, terutama pertambangan, pertanian, dan pendidikan internasional, melihat RCEP sebagai peluang strategis untuk memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik. Organisasi seperti Business Council of Australia dan Australian Chamber of Commerce and Industry secara aktif mendukung kebijakan perdagangan bebas, dengan menekankan pentingnya penghapusan hambatan tarif dan non-tarif demi meningkatkan daya saing global (Australian Council of Trade Unions (ACTU), 2020). Selain itu, asosiasi industri seperti National Farmer's Federation (NFF) dan *Group of Eight Australia*, secara terbuka menyuarakan dan memberikan dukungan terhadap RCEP karena memberikan manfaat yang signifikan terhadap sektor pertanian dan jasa pendidikan, dua sektor utama yang menjadi penyumbang besar terhadap ekspor Australia. Data ekspor menunjukkan bahwa nilai ekspor daging sapi ke Tiongkok telah mencapai lebih dari AUD 2 miliar per tahun, sedangkan sektor pendidikan telah menghasilkan lebih dari AUD 40 miliar sebelum pandemi melanda (Department of Foreign Affairs, 2022).

Jajak pendapat yang dilakukan oleh DFAT juga menunjukkan bahwa pelaku usaha dan institusi pendidikan menyambut baik pembukaan akses pasar di Asia melalui RCEP (DFAT, 2019).

Namun, dukungan terhadap RCEP tidak bersifat universal. Di sisi lain, serikat pekerja dan LSM mengajukan keberatan terkait implikasi perjanjian tersebut terhadap perlindungan tenaga kerja, lingkungan, dan kedaulatan regulasi nasional. Australian Council of Trade Unions (ACTU), misalnya, menyatakan kekhawatirannya bahwa RCEP dapat melemahkan posisi pekerja domestik karena tekanan terhadap standar ketenagakerjaan dan kemungkinan praktik “race to the bottom” dalam pengupahan (Australian Council of Trade Unions (ACTU), 2020). LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan lingkungan juga mengkritik perjanjian ini karena dinilai kurang memberikan jaminan yang memadai terkait isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisa terhadap distribusi manfaat antar sektor menunjukkan bahwa sektor pertanian maupun jasa memperoleh manfaat lebih besar dari RCEP, sedangkan pada sektor manufaktur ringan dan pelaku usaha mikro dan menengah cenderung berhati-hati terhadap arus liberalisasi yang cepat karena risiko kompetisi yang begitu tinggi (Doner et al., 2021)

Dalam kerangka pendekatan berbasis masyarakat, kebijakan akhir Australia untuk menandatangani RCEP merupakan hasil dari agregasi kepentingan dan kompromi politik di tingkat domestik. Pemerintah Australia, dalam hal ini Departemen Perdagangan dan Urusan Luar Negeri (DFAT), harus memainkan peran sebagai mediator yang menyeimbangkan kebutuhan untuk membuka akses pasar bagi eksportir nasional dengan tekanan domestik yang menuntut perlindungan terhadap kelompok rentan (Lebow, 1997). Proses ini mencerminkan asumsi utama dalam pendekatan ini, bahwa diplomasi ekonomi tidak dijalankan semata-mata oleh negara dalam bentuk institusi monolitik, melainkan sebagai arena negosiasi antara

aktor-aktor domestik yang memiliki kapasitas berbeda dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dorongan dari aktor domestik seperti Ai Group dan NFF juga memberikan penetrasi politis terhadap pemerintah agar lebih aktif dalam forum perundingan perdagangan kawasan. Sementara itu, survei dari Lowy Institute menunjukkan bahwa elit kebijakan Australia secara keseluruhan mendukung integrasi ekonomi regional, meskipun harus tetap mewaspadai potensi-potensi dominasi Tiongkok dalam forum RCEP (Kassam, 2021).

Kebijakan luar negeri ekonomi Australia juga tidak lepas dari dinamika politik dalam negeri. Pemerintah koalisi yang berkuasa pada saat RCEP ditandatangani harus mempertimbangkan keseimbangan antara agenda pro-perdagangan yang disuarakan oleh komunitas bisnis dan kekhawatiran elektoral yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dalam sistem demokrasi parlementer seperti Australia, dukungan dari kelompok konstituen dan persepsi publik terhadap manfaat atau risiko dari kebijakan ekonomi luar negeri dapat mempengaruhi stabilitas politik pemerintahan (Capling & Low, 2010). Oleh karena itu, keterlibatan Australia dalam RCEP bukan semata-mata kebijakan rasional negara untuk memaksimalkan kepentingan nasional, tetapi lebih sebagai hasil kompromi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap arah dan isi perjanjian tersebut.

Pendekatan ini juga dapat menjelaskan mengapa Australia mendorong adanya klausul dalam RCEP yang berkaitan dengan transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun RCEP tidak sekomprehensif Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), Australia tetap mengupayakan agar beberapa nilai tata kelola yang baik tercermin dalam

perjanjian tersebut, sebagai bentuk respons terhadap tekanan dari masyarakat sipil domestik yang menuntut akuntabilitas dalam negosiasi perdagangan (Australian Council of Trade Unions (ACTU), 2020). Selain itu, Australia mengusulkan agar sistem perdagangan multilateral yang inklusif tetap dipertahankan dalam proses integrasi ekonomi kawasan, menunjukkan adanya pengaruh dari kelompok intelektual dan akademisi dalam proses formulasi kebijakan luar negeri ekonomi.

Dalam pernyataan bersama 2 November 2021, Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Menteri Perdagangan Dan Tehan menyampaikan bahwa “Australia’s ratification of RCEP does not change the Government’s grave concern about the situation in Myanmar”, sambil menegaskan ratifikasi adalah “langkah penting” untuk memastikan akses pasar bagi petani dan sektor bisnis nasional ke dalam perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia (Australian Government 2020). Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan kepentingan ekonomi melalui integrasi ke pasar utama dengan keprihatinan diplomatik dan etika terhadap kondisi politik di Myanmar.

Dalam keseluruhan proses ini, dapat dilihat bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan dari keanggotaan RCEP lebih bersifat kolektif dan tersebar luas, seperti peningkatan ekspor, pertumbuhan PDB, dan integrasi rantai pasok regional. Sebaliknya, biaya sosial atau ekonomi yang ditanggung akibat liberalisasi perdagangan sering kali bersifat sektoral dan menimpa kelompok-kelompok tertentu secara lebih langsung, seperti pekerja di sektor manufaktur atau petani kecil yang harus bersaing dengan produk impor. Pemerintah Australia perlu mengelola dinamika ini melalui kebijakan kompensasi domestik, seperti program pelatihan ulang tenaga kerja, dukungan untuk inovasi industri, dan jaminan sosial bagi sektor

terdampak. Dengan kata lain, diplomasi ekonomi Australia tidak berhenti pada meja perundingan internasional, melainkan harus dilengkapi dengan kebijakan domestik yang responsif dan inklusif (Janashia, n.d.).

Pendekatan berbasis masyarakat ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proses pengambilan kebijakan dalam kebijakan perdagangan luar negeri. Negara bukanlah entitas tunggal yang bertindak secara rasional dalam arena internasional, melainkan sebagai arena kontestasi di mana kepentingan-kepentingan domestik bersaing untuk membentuk preferensi nasional. Keikutsertaan Australia dalam RCEP mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menavigasi kepentingan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan stabilitas sosial-politik domestik.

### **3.4 Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik**

Di Australia, perumusan kebijakan perdagangan internasional secara konstitusional berada di bawah kewenangan eksekutif, khususnya melalui DFAT. DFAT memimpin proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*), termasuk RCEP dan bertanggung jawab menyusun posisi Australia dalam forum internasional. Setelah negosiasi selesai, hasil dari perjanjian harus melalui proses ratifikasi oleh parlemen, namun fungsi legislatif ini umumnya bersifat formalitas karena parlemen tidak memiliki hak untuk mengubah isi perjanjian yang telah dinegosiasikan. Proses ini mencerminkan struktur kelembagaan yang memberikan kekuasaan dominan kepada lembaga eksekutif dalam perumusan kebijakan perdagangan (DFAT, 2019; Wilson, 2022).

Meskipun secara prosedural DFAT mengadakan konsultasi publik dengan aktor-aktor domestik seperti asosiasi bisnis, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat sipil, studi menunjukkan bahwa pengaruh kelompok-kelompok tersebut terhadap arah substansi negosiasi relatif terbatas. Dalam kerangka RCEP, tidak terdapat aktor domestik yang secara signifikan menghambat proses ratifikasi, menunjukkan adanya konsensus politik dan institusional terhadap integrasi ekonomi regional. Hal ini juga tercermin dalam rendahnya resistensi dari parlemen dan publik terhadap RCEP, cukup berbeda dengan kasus di beberapa negara lain di area kawasan.

**Tabel 8. Institusi dan Pengambilan Kebijakan Domestik – Australia dan RCEP**

No.	Jenis Data	Hasil Analisis	Sumber
1.	Struktur institusional pengambilan kebijakan perdagangan	Kebijakan perdagangan Australia dirumuskan oleh DFAT (eksekutif) dan diratifikasi oleh parlemen. DFAT bertindak sebagai aktor teknis utama dalam perundingan.	Capling & Nossal (2009); DFAT (2020). Trade Policy Statement
2.	Transkrip debat parlemen terkait ratifikasi RCEP	Transkrip menunjukkan dukungan mayoritas terhadap RCEP dengan sedikit oposisi. Isu yang dibahas meliputi transparansi dan dampak terhadap sektor pekerja.	Parliament of Australia Hansard (2021)
3.	Dokumen resmi DFAT mengenai mandat negosiasi	DFAT merilis prinsip-prinsip negosiasi yang mencerminkan kepentingan nasional, prioritas ekspor, serta keterlibatan pemangku kepentingan domestik.	DFAT (2019). RCEP Negotiation Principles
4.	Artikel berita/laporan think tank tentang peran partai politik dan oposisi	Oposisi utama (Partai Buruh) tidak memblokir RCEP. Beberapa LSM menyoroti keprihatinan terhadap transparansi, namun pengaruhnya terbatas.	The Guardian (2020); Lowy Institute (2021)
5.	Analisis peran parlemen dalam ratifikasi dan pengawasan	Studi menunjukkan bahwa parlemen Australia memiliki peran formal dalam ratifikasi, tetapi terbatas dalam memengaruhi isi negosiasi. Fungsi pengawasan bersifat reaktif.	George, M. (2018). Parliamentary Oversight of Trade Agreements in Australia. Australian Journal of International Affairs

Berdasarkan data berikut dapat disimpulkan bahwa, variabel institusional dalam diplomasi ekonomi, khususnya yang menyoroti relasi antara aktor prinsipal dan agen, dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan strategis seperti ini terbentuk dalam suatu negara demokratis seperti Australia. Dalam kerangka

hubungan prinsipal-agen, negosiasi perdagangan internasional tidak semata-mata dijalankan oleh pihak eksekutif atau kementerian luar negeri sebagai agen, tetapi juga dikontrol, diawasi, dan diarahkan oleh prinsipal seperti parlemen, lembaga pengawas, serta kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan veto politik atau hukum. Namun, dalam konteks RCEP, tidak ditemukan aktor domestik yang memiliki kekuatan veto signifikan, sehingga proses negosiasi berlangsung relatif lancar dan minim kontroversi (Wilson, 2022).

Australia sebagai negara demokrasi parlementer memiliki sistem pengambilan kebijakan yang melibatkan banyak aktor institusional. Ketika pemerintah Australia memutuskan untuk berpartisipasi dalam RCEP, proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh kementerian perdagangan atau diplomat senior yang bertindak sebagai agen dalam perundingan. Kebijakan ini terlebih dahulu harus memperoleh dukungan dari parlemen, melalui mekanisme review terhadap perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Treaties Committee of the Australian Parliament. Perdebatan pada Parlemen Hansard menunjukkan dukungan mayoritas terhadap ratifikasi RCEP, dengan pembahasan yang menyoroti isu transparansi serta dampak terhadap pekerja, serta hal tersebut tanpa penolakan dari partai oposisi (Brockman, 2021).

Selain itu, aktor non-negara seperti asosiasi industri, serikat pekerja, dan kelompok advokasi kebijakan publik juga turut memberikan masukan yang berpengaruh terhadap posisi negosiasi Australia. Dalam hal ini, parlemen berfungsi sebagai prinsipal yang memberikan mandat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses negosiasi, memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan preferensi nasional yang lebih luas, termasuk kepentingan ekonomi,

ketenagakerjaan, dan kepatuhan terhadap hukum domestik (Parliament of Australia, 2021).

Institusi birokrasi Australia seperti Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menjalankan fungsi sebagai agen utama dalam diplomasi ekonomi, termasuk dalam proses RCEP. DFAT bertanggung jawab mengonsolidasikan posisi nasional, melakukan konsultasi dengan berbagai sektor domestik, serta menyusun kerangka teknis dari perjanjian yang dinegosiasikan. Dalam posisi ini, DFAT harus tetap berada dalam kerangka mandat yang telah ditentukan oleh prinsipal, yang dalam konteks Australia, termasuk Pemerintah Federal dan parlemen. Pemerintah Australia menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam RCEP bertujuan untuk mendukung sektor ekspor nasional, menciptakan peluang ekonomi baru, serta memperkuat integrasi dengan mitra dagang di kawasan Asia-Pasifik. Dalam rilis resmi, Menteri Perdagangan saat itu, Dan Tehan, menegaskan bahwa RCEP akan “memastikan akses pasar yang lebih baik bagi pelaku usaha Australia” dan bahwa kesepakatan ini telah melalui proses konsultasi luas dengan parlemen dan pemangku kepentingan domestik (Australian Government, 2020).

Komitmen ini mencerminkan konsensus institusional atas nilai strategis RCEP bagi ekonomi nasional. Sebagai contoh, artikel *The Guardian* menggarisbawahi bahwa oposisi utama yakni Partai Buruh tidak menghambat proses ratifikasi, meskipun terdapat kritik dari sejumlah LSM mengenai isu hak buruh dan transparansi, pengaruh oposisi terhadap proses formal relatif terbatas.

Hal ini juga menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi bukanlah proses yang otonom dari logika institusional domestik, melainkan sangat tergantung pada struktur otoritas formal yang ada. Tanpa adanya persetujuan dan legitimasi dari

aktor-aktor prinsipal, hasil negosiasi tidak akan dapat diratifikasi dan diimplementasikan (DFAT, 2021c).

Pilihan Australia untuk bergabung dalam RCEP juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal yang mengatur bagaimana otoritas dan legitimasi didistribusikan. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan sikap oposisi politik dan aspirasi dari negara bagian serta industri-industri strategis yang berpotensi terdampak oleh liberalisasi perdagangan. Misalnya, sektor pertanian dan manufaktur di Australia memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan masuknya produk murah dari negara-negara Asia yang dapat mengancam kelangsungan produksi domestik. Oleh karena itu, proses negosiasi memerlukan mekanisme konsultasi yang intensif untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan ini. DFAT telah mencatat bahwa berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan ditemukan fakta bahwa posisi Australia dalam negosiasi perdagangan serta cerminan partisipasi domestik lebih luas (DFAT, 2019). Dalam hal ini, sistem institusional Australia memungkinkan terjadinya proses deliberatif yang menjamin bahwa perjanjian seperti RCEP mencerminkan kepentingan nasional secara komprehensif.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum dan akuntabilitas publik juga memainkan peran penting dalam mengarahkan proses diplomasi ekonomi Australia. Sesuai dengan prinsip *good governance*, setiap perjanjian internasional yang dinegosiasikan harus melewati proses transparansi, termasuk pelibatan masyarakat sipil dan publikasi hasil analisis dampak ekonomi. Namun, studi oleh George (George, 2018) menunjukkan bahwa meskipun parlemen Australia memiliki peran formal dalam proses ratifikasi, perannya dalam mempengaruhi isi negosiasi relatif terbatas dan cenderung bersifat reaktif. Prinsipal dalam hal ini tidak hanya lembaga

legislatif, tetapi juga masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Ini menjadi pembeda penting antara Australia dan beberapa negara mitra dalam RCEP yang mungkin memiliki proses pengambilan kebijakan yang lebih tersentralisasi atau otoriter. Dengan demikian, partisipasi Australia dalam RCEP bukan hanya refleksi dari kepentingan strategis dalam memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga merupakan hasil dari proses institusional yang melibatkan negosiasi domestik yang kompleks antara berbagai aktor formal dan informal.

Analisis dari (Capling & Nossal, 2000) dalam tulisannya "*Death of Distance or Tyranny of Distance? The Internet, the State and Australian Trade Policy*" menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan perdagangan Australia sering kali melibatkan interaksi antara aktor teknokratik dengan aktor politik, di mana pertimbangan teknis seringkali dibatasi oleh kalkulasi politik domestik. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur DFAT yang berperan sebagai badan teknokratik yang memimpin negosiasi, namun tetap beroperasi di bawah mandat formal yang telah disusun berdasarkan masukan politik dan sosial domestik (DFAT, 2019). Dalam konteks RCEP, ini berarti bahwa kendati agen seperti DFAT memiliki kapasitas teknis tinggi dalam negosiasi, namun keberhasilan mereka tetap tergantung pada dukungan politik yang dapat diperoleh dari prinsipal seperti parlemen dan kabinet. Hal ini juga diperkuat oleh teori hubungan internasional yang menekankan pentingnya domestic institutional constraints dalam mempengaruhi perilaku negara dalam forum internasional (Putnam, 1988).

Secara keseluruhan, bergabungnya Australia ke dalam RCEP dapat dipahami melalui lensa teori hubungan prinsipal-agen dalam institusi diplomasi ekonomi.

Proses pengambilan kebijakan tidak hanya mencerminkan rasionalitas ekonomi atau kepentingan geostrategis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur institusional yang mengatur siapa yang memiliki otoritas formal, bagaimana kebijakan diambil, serta bagaimana akuntabilitas terhadap publik dijaga. Keikutsertaan Australia dalam RCEP mencerminkan keberhasilan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan domestik melalui mekanisme institusional yang terbuka dan akuntabel, serta menunjukkan bagaimana kapasitas institusional negara menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dan hasil kebijakan luar negerinya.

### **3.5 Faktor Ideasional**

Menurut Woolcock, dalam menjelaskan keterlibatan Australia bergabung kedalam RCEP, pendekatan variabel faktor ideasional memberikan kerangka yang relevan untuk melihat bagaimana identitas, nilai, dan persepsi mempengaruhi kebijakan luar negeri. Ideational Faktor juga menekankan bahwa komitmen terhadap multilateralisme dan norma perdagangan bebas, memainkan peran penting dalam membentuk preferensi negara. Dalam konteks ini, keterlibatan Australia tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh keyakinan ideologis terhadap tatanan ekonomi regional yang terbuka dan berbasis aturan. (Woolcock 2017, 26-27).

Australia sebagai negara liberal demokratis secara historis telah memperlihatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip liberalisme ekonomi. Hal ini tercermin dalam kebijakan perdagangan bebas, keterbukaan pasar, dan keterlibatan aktif dalam forum multilateral seperti WTO dan APEC. Pilihan Australia untuk

bergabung ke dalam RCEP konsisten dengan kerangka berpikir liberal, yang menekankan pentingnya kerja sama ekonomi antarnegara sebagai sarana untuk menciptakan efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas kawasan. RCEP dipandang sebagai platform yang dapat memperkuat integrasi regional dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi eksportir Australia, termasuk di sektor pertanian, pendidikan, dan jasa keuangan (Parliament of Australia, 2021). Hal tersebut dapat direfleksikan melalui *Foreign Policy White Paper* tahun 2017 yang menyatakan bahwa Australia mendukung partisipasi kawasan demi memperkuat tatanan global yang berbasis aturan serta memperluas pengaruh strategis (Australian Government, 2017).

Selain dokumen resmi seperti *Foreign Policy White Paper* 2017, faktor ideasional juga tercermin melalui pernyataan elite kebijakan dalam forum publik maupun wawancara media. Misalnya, Menteri Perdagangan Dan Tehan dalam wawancara bersama *The Guardian* pada Oktober 2021 menekankan pentingnya Australia untuk “*be at the table*” dalam setiap forum internasional yang membahas isu perdagangan dan transisi ekonomi global. Menurut Tehan, keterlibatan aktif tersebut diperlukan agar Australia mampu mempengaruhi arah kebijakan internasional serta melindungi kepentingan ekonominya dari ancaman proteksionisme (Tehan 2021). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana elite kebijakan Australia secara konsisten menekankan orientasi engagement, *rules-based order*, serta strategi *middle-power diplomacy* sebagai kerangka ideasional dalam partisipasi pada perjanjian perdagangan multilateral seperti RCEP.

Keyakinan Australia terhadap manfaat perdagangan bebas dan keterlibatan multilateral menjadi faktor ideasional yang dominan. Pemerintah Australia tidak

semata-mata mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan nilai strategis bersifat jangka panjang dari keterlibatan aktif dalam membentuk arsitektur ekonomi regional. Dengan menjadi bagian dari RCEP, Australia memastikan dirinya tetap relevan dan memiliki pengaruh dalam pengaturan normatif yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Komitmen Australia terhadap kerja sama kawasan dipertegas oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, dalam berbagai pernyataan publik yang pada dasarnya menyatakan bahwa RCEP merepresentasikan peluang strategis untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan memperkuat integrasi kawasan Asia-Pasifik (Reuters, 2021).

Lebih jauh, partisipasi Australia dalam RCEP juga mendapat berbagai kritik dari dalam negeri. ACTU menilai perjanjian ini tidak melindungi hak-hak pekerja secara komprehensif karena tidak mewajibkan negara anggota meratifikasi konvensi inti dari ILO, sehingga muncul potensi merugikan buruh domestik (Australian Council of Trade Union, 2021). Kelompok lingkungan seperti *Friends of the Earth Australia* juga mengkritik RCEP karena tidak mencantumkan komitmen lingkungan yang kuat dan dikhawatirkan justru mendukung industri yang merusak alam. Sementara itu, organisasi seperti AFTINET menyalahkan proses negosiasi yang tidak transparan serta mengkritisi keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) yang bisa melemahkan kedaulatan hukum Australia (AFTINET, 2020). Pada sisi lain, Pemerintah Australia menyambut baik usulan RCEP dengan harapan dapat membuka akses pasar, memperkuat daya tawar dan posisi Australia dalam ekonomi kawasan, serta

membantu pemulihan pasca Covid-19 yang melanda Australia. Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan antara strategi ekonomi global serta terdapat kekhawatiran sosial dalam negeri (DFAT, 2021a).

Pilihan Australia untuk bergabung dengan RCEP juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya praktik proteksionisme di beberapa negara. Dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Asia, Australia berupaya mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi ketergantungan terhadap mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di sinilah tampak jelas pengaruh pemikiran liberal, di mana integrasi ekonomi regional dianggap sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Güngör & Tutumlu, 2012).

Adapun hal tersebut sejalan dengan pendapat Richard Marles dan Julie Bishop yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif dalam struktur ekonomi kawasan merupakan bagian dari peran strategis Australia sebagai kekuatan *middle power*. Mereka menilai bahwa Australia harus berkontribusi dalam membentuk tatanan ekonomi yang terbuka dan inklusif agar tidak tersingkir dalam dinamika kekuatan besar pada kawasan Asia-Pasifik (Julie Bishop, 2018; Richard Marles, 2018).

Tidak dapat diabaikan bahwa dalam praktiknya, aspek merkantilis juga tetap hadir dalam pendekatan diplomasi ekonomi Australia. Walaupun secara ideologis cenderung liberal, negara ini tetap mempertahankan kalkulasi strategis terhadap kepentingan nasional. Misalnya, dalam negosiasi RCEP, Australia secara aktif memperjuangkan akses pasar yang menguntungkan bagi sektor-sektor domestiknya serta berupaya menjaga perlindungan terhadap industri yang dianggap strategis. Ini

menunjukkan bahwa ideologi bukan satu-satunya penentu, melainkan berinteraksi dengan kepentingan material dan struktur institusional yang ada. Dukungan dari institusi terhadap perkembangan liberalisasi perdagangan juga tercatat pada laporan dan *Policy Brief* dari Lowy Institute tahun 2021 serta laporan DFAT tahun 2021 yang mana pada dasarnya menekankan pentingnya multilateralisme dan perdagangan bebas sebagai kebijakan dan strategi dasar bagi Australia (DFAT, 2021a; Kassam, 2021).

Literatur akademik seperti yang disampaikan oleh (Finnemore & Sikkink, 1998) menegaskan bahwa ide dan norma dapat menjadi determinan penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka ini, bergabungnya Australia ke dalam RCEP dapat pula dipahami sebagai hasil dari internalisasi norma liberal dalam institusi kebijakan luar negerinya. Pandangan ini didukung oleh kenyataan bahwa elite kebijakan Australia, baik dari kalangan pemerintah maupun pelaku bisnis, secara umum mendukung keterbukaan dan perdagangan bebas sebagai prinsip dasar diplomasi ekonomi negara tersebut. Studi yang dilakukan oleh Capling dan Nossal (2000) menemukan fakta bahwa sejak tahun 1980-an, nilai liberal telah menjadi panduan utama dalam kebijakan-kebijakan perdagangan Australia, di mana kebijakan perdagangan bebas tidak hanya dilihat sebagai strategi ekonomi, namun juga sebagai bagian dari identitas suatu negara secara normatif. Hal ini diperkuat oleh teori Higgot yang menyatakan bahwa *free trade* dianggap sebagai elemen penting dalam diplomasi Australia, yang bertujuan sebagai jalan tengah antara kepentingan nasional dengan partisipasi aktif dalam tatanan global yang berlandaskan aturan.

Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional juga memberikan penjelasan tambahan. Dalam pandangan konstruktivis, struktur internasional tidak hanya terbentuk dari kekuatan material, tetapi juga dari intersubjektivitas aktor—yakni bagaimana aktor memahami dan menginterpretasi dunia sekitarnya. Dalam hal ini, Australia melihat RCEP bukan hanya sebagai kesepakatan perdagangan, tetapi sebagai simbol komitmen terhadap tatanan ekonomi regional yang berbasis pada aturan (*rules-based order*), suatu prinsip yang menjadi bagian dari identitas normatif Australia dalam politik internasional (Putnam, 1988).

Kebijakan Australia untuk bergabung ke dalam RCEP merupakan hasil dari kombinasi antara rasionalitas terbatas dan orientasi ideologis liberal yang telah tertanam dalam paradigma kebijakan ekonominya. Di tengah kompetisi geopolitik dan ketidakpastian global, Australia melihat perdagangan bebas dan kerja sama regional bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas pengaruh, meningkatkan kesejahteraan domestik, dan memperkuat stabilitas kawasan.

Teori yang menekankan pada peran ideologi dalam diplomasi ekonomi memberikan kerangka yang kaya untuk memahami kebijakan Australia dalam konteks RCEP. Meskipun kalkulasi kepentingan tetap menjadi faktor penting, tidak dapat disangkal bahwa pandangan dunia yang dipegang oleh para pengambil kebijakan turut membentuk arah strategi internasional negara. Dengan mengadopsi pendekatan liberal terhadap integrasi ekonomi, Australia menunjukkan bahwa ide dan keyakinan tetap menjadi elemen kunci dalam arsitektur kebijakan luar negerinya. Australia secara konsisten memposisikan diri sebagai *middle power* yang berkomitmen pada tatanan global berbasis *rules-based order* dan liberalisme

ekonomi sebagai dasar utama diplomasi luar negeri. Dengan demikian, partisipasi aktif Australia dalam arsitektur kawasan dan komitmen terhadap *free trade* bukan hanya strategi praktis, melainkan sebagai bagian dari identitas diplomatik dan peran strategis Australia sebagai *middle power* di kancah perdagangan global.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya tentang variabel yang berkaitan dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal tersebut terdapat 5 variabel yaitu : (1) Kekuatan Ekonomi Relatif; (2) Rezim Internasional; (3) Kepentingan Negara; (4) Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik; dan (5) Faktor Ideasional. Berikut merupakan uraian singkat kesimpulan hasil analisis pada penelitian ini.

No	Variabel	Hasil Analisis
1.	Kekuatan Ekonomi Relatif <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran ekonomi</li> <li>2. Daya Tarik pasar</li> <li>3. Peran strategis</li> <li>4. Keterbatasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran ekonominya memberikan posisi tawar yang substansial dalam merancang aturan, khususnya sektor unggulan.</li> <li>2. Australia menjadi pasar penting dan juga bergantung pada kawasan, sehingga daya tawar bersifat timbal balik.</li> <li>3. Australia tidak hanya mengikuti, tapi turut membentuk norma dan struktur RCEP secara strategis (co-architect).</li> <li>4. Australia rentan terhadap gejolak eksternal, sehingga perlu RCEP untuk diversifikasi dan stabilisasi perdagangan.</li> </ol>
2.	Rezim Internasional <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran RCEP</li> <li>2. Tujuan Australia</li> <li>3. Kelembagaan</li> <li>4. Manfaat Strategis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RCEP berperan sebagai <i>rule-making platform</i> Asia, memastikan kelanjutan kerja sama multilateral berbasis aturan di tengah ketidakpastian global.</li> <li>2. Keikutsertaan Australia adalah langkah konsisten terhadap prinsip liberalisme ekonomi dan penguatan norma perdagangan regional berbasis aturan.</li> <li>3. Kelembagaan RCEP memberi ruang bagi middle power seperti Australia untuk berperan melalui komite teknis dan pengaruh normatif, meskipun bukan pemimpin hegemonik.</li> <li>4. RCEP menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan posisi dagang Australia di tengah rivalitas Tiongkok-AS dan volatilitas globalisasi.</li> </ol>
3.	Kepentingan Negara <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepentingan Ekonomi</li> <li>2. Kepentingan Politik</li> <li>3. Kepentingan Domestik</li> <li>4. Hasil Agregasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia menggunakan RCEP untuk memperluas ekspor dan mengatasi hambatan tarif yang sebelumnya menghalangi produk-produk utama di pasar Asia.</li> <li>2. Australia memanfaatkan RCEP untuk menegaskan posisinya sebagai middle power yang stabil,</li> </ol>

No	Variabel	Hasil Analisis
		<p>sekaligus mengurangi ketergantungan bilateral yang riskan secara politis.</p> <p>3. Kepentingan domestik sangat terfragmentasi: sektor bisnis dan pendidikan mendukung, serikat buruh dan LSM lingkungan menentang—mewakili tarik-ulur khas demokrasi ekonomi.</p> <p>5. Agregasi kepentingan terjadi lewat proses teknokratis dan representatif terbatas; pemerintah menyeimbangkan tekanan ekonomi dan politik domestik dengan agenda luar negeri.</p>
4.	<p>Lembaga dan Pengambilan Kebijakan Domestik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Utama</li> <li>2. Proses Pengawasan</li> <li>3. Partisipasi Publik</li> <li>5. Proses Legislasi &amp; Ratifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DFAT menjalankan fungsi negosiasi dan koordinasi lintas kementerian, menjadi agen teknokratik dalam diplomasi ekonomi Australia.</li> <li>2. Proses pengawasan dilakukan setelah negosiasi selesai, memberi kesan <i>ex-post scrutiny</i>, bukan kendali substantif selama proses perundingan.</li> <li>3. Proses inklusi publik sangat teknis dan terbatas pada aktor yang sudah terorganisir; masyarakat sipil umum relatif tidak terlibat.</li> <li>5. Menunjukkan sifat <i>executive-led process</i> dalam kebijakan perdagangan luar negeri Australia; cerminan demokrasi delegatif dalam perjanjian internasional.</li> </ol>
5.	<p>Faktor Ideasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai &amp; Identitas Nasional</li> <li>2. Pandangan Ideologis</li> <li>3. Persepsi Strategis</li> <li>4. Pengaruh dalam Kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas ini mendorong Australia berpartisipasi aktif dalam membentuk norma perdagangan kawasan, bukan hanya sekadar sebagai penerima aturan.</li> <li>2. Liberalisme ekonomi menjadi landasan ideologis utama, menjelaskan mengapa Australia lebih memilih RCEP dibanding proteksi nasional atau blok eksklusif.</li> <li>3. Australia melihat RCEP bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi sebagai <i>strategic hedge</i> untuk mengelola dinamika kekuatan besar di Asia-Pasifik.</li> <li>4. Ide-ide liberal terinstitusionalisasi dalam cara Australia mendesain perjanjian dagang: mendorong transparansi, hak kekayaan intelektual, dan digital trade rules.</li> </ol>

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel ukuran, kekuatan, dan ekonomi yang menjadi elemen utama dalam variabel kekuatan ekonomi relatif, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil oleh Australia untuk semakin memaksimalkan peran dan manfaatnya dalam kerangka kerja sama RCEP:

### 1. Memanfaatkan Skala Ekonomi Domestik secara Progresif

Ukuran ekonomi Australia yang besar dan terdiversifikasi harus terus dikelola untuk memperkuat posisi tawar dalam perjanjian regional. Pemerintah Australia disarankan untuk terus memperluas kapasitas produksi dalam sektor unggulan—seperti jasa, pertambangan, pertanian, hingga pendidikan, dan pariwisata agar mampu mempertahankan daya saing di tengah kompetisi pasar yang semakin terbuka. Kebijakan industrialisasi yang berbasis teknologi dan inovasi harus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik yang menjadi sumber utama kekuatan tawar dalam forum multilateral seperti RCEP.

### 2. Memperkuat Peran Lembaga Administratif dan Diplomatik

Kekuatan Australia dalam area negosiasi sangat ditopang oleh kapasitas administratif institusi seperti Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Oleh karena itu, Australia perlu terus meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi berbasis data, memperluas jaringan riset kebijakan, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk merespons dinamika perdagangan regional secara cepat dan akurat. Kekuatan institusional ini juga penting dalam membentuk koalisi kebijakan dengan negara-negara mitra dan menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan geopolitik.

### 3. Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dengan Kepemimpinan Regional

Australia perlu memanfaatkan kekuatannya tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk memperkuat perannya sebagai regional rule-shaper dalam integrasi ekonomi Asia-Pasifik. Dengan mendorong standarisasi kebijakan perdagangan, sistem penyelesaian sengketa yang adil, dan prinsip-prinsip transparansi dalam RCEP, Australia

dapat membangun legitimasi sebagai pemimpin normatif di kawasan. Hal ini tidak hanya memperbesar pengaruhnya dalam RCEP, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi regional yang turut berdampak pada ekonomi domestiknya.

#### 4. Diversifikasi Strategi Ekonomi dan Pasar Ekspor

Keterlibatan aktif dalam RCEP harus dibarengi dengan strategi diversifikasi pasar dan mitra dagang. Australia perlu memperluas akses tidak hanya ke negara-negara utama seperti Tiongkok dan Jepang, tetapi juga ke anggota ASEAN lainnya yang sedang berkembang. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tertentu dan menciptakan ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal seperti perang dagang, proteksionisme, atau krisis global.

#### 5. Penguatan Diplomasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Australia perlu memastikan bahwa keuntungan dari keikutsertaan dalam RCEP dapat dirasakan secara merata di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan kompensasi sektor yang terdampak, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta penguatan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan ekspor. Diplomasi ekonomi yang inklusif akan meningkatkan dukungan domestik terhadap integrasi ekonomi kawasan dan menjaga stabilitas sosial-politik di dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Peter, Petri, & Plummer, M. G. (2020). East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs. *Peterson Institute For International Economics*, 1–35.
- Abussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Syakir Media Press.
- (ACTU), A. C. of T. U. (2020). Submission on RCEP Negotiations. In *Australian Council of Trade Unions (ACTU)* (p. 1).  
<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep/submissions>
- Adila, S., & Suryadipura, D. (2023). ASEAN'S ROLE IN THE REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) FORMATION TO ENHANCE REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(1). <https://doi.org/10.7454/global.v25i1.1279>
- AFTINET. (2020). *Submission to the Department of Foreign Affairs and Trade On the Plurilateral Negotiations on Trade-Related Aspects of Electronic Commerce*.
- Armstrong, S. (2022). Australia's Interests in East Asia's Regional Comprehensive Economic Partnership. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*, 04, 1–30.
- Armstrong, S., & Drysdale, P. (2022a). The Economic Cooperation Potential of East Asia RCEP Agreement. *East Asian Economic Review*, 26(1), 3–25.  
<https://doi.org/10.11644/kiiep.eaer.2022.26.1.403>
- Armstrong, S., & Drysdale, P. (2022b). The Economic Cooperation Potential of East Asia RCEP Agreement. *East Asian Economic Review*, 26(1), 3–25.  
<https://doi.org/10.11644/kiiep.eaer.2022.26.1.403>
- Armstrong, S., & Drysdale, P. (2022c). *The Implications of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for Asian Regional Architecture 1*.
- ASEAN Secretary. (2020). *WE CARE WE PREPARE WE PROSPER*.  
[www.asean.org](http://www.asean.org)
- Australian Council of Trade Union. (2021, July 28). *RCEP agreement will legitimise the military dictatorship in Myanmar and fails to provide benefit to Australian workers*. Actu.Org.Au. [https://www.actu.org.au/media-release/rcep-agreement-will-legitimise-the-military-dictatorship-in-myanmar-and-fails-to-provide-benefit-to-australian-workers/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.actu.org.au/media-release/rcep-agreement-will-legitimise-the-military-dictatorship-in-myanmar-and-fails-to-provide-benefit-to-australian-workers/?utm_source=chatgpt.com)
- Australian Council of Trade Unions (ACTU). (2020). *Submission on RCEP Negotiations*. Australian Council of Trade Unions (ACTU).  
<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep/submissions>
- Australian Government. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*.
- Australian Government. (2020). *RCEP Regulation Impact Statement November 2020*.
- Australian Outlook. (2023). *Australia's Unique Opportunity in Regional Trade: The RCEP*.
- Baldwin, A. D. (2016). *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Princeton University Press.

- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy-Decision making and negotiation in international economic relations* (N. Bayne & S. Woolcock, Eds.; 4th ed.). Routledge Taylor & Francis Group.
- Brockman, S. (2021). *FORTY-SIXTH PARLIAMENT FIRST SESSION-EIGHTH PERIOD*.
- Budi Utomo, N. (2023). ANALISIS DAMPAK KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA CEPA) TERHADAP NERACA PERDAGANGAN. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 2023.
- Buzan, B. (1985). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. *International Affairs*, 61(2), 290–291.  
<https://doi.org/10.2307/2617490>
- Capling, Ann., & Low, Patrick. (2010). *Governments, Non-State Actors and Trade Policy-Making : Negotiating Preferentially or Multilaterally?* Cambridge University Press.
- Capling, Ann., & Nossal, K. Richard. (2000). *Death of distance or tyranny of distance? : the internet, deterritorialisation, and the anti-globalisation movement in Australia*. Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
- Dent, C. M. (2021). Trade, climate and energy: A new study on climate action through free trade agreements. *Energies*, 14(14).  
<https://doi.org/10.3390/en14144363>
- Department of Foreign Affairs, T. (2022). *The Department of Foreign Affairs and Trade Annual Report 2022—23*.
- DFAT. (2017). *Foreign Policy White Paper. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*.
- DFAT. (2019). *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)*. [www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep](http://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep).
- DFAT. (2021a). *Annual Report 2021-22*.
- DFAT. (2021b). Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). In *Australian Government* (p. 1).  
<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep>
- DFAT. (2021c). *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)*. Australian Government .  
<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep>
- DFAT. (2022, February 17). *Australian Government response to the Joint Standing Committee on Treaties Report 196: Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Dfat.Gov.Au.  
[https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep/australian-government-response-joint-standing-committee-treaties-report-196-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/rcep/australian-government-response-joint-standing-committee-treaties-report-196-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement?utm_source=chatgpt.com)
- Doner, R. F., Noble, G. W., & Ravenhill, J. (2021). The political economy of automotive industrialization in East Asia. In *The Political Economy of Automotive Industrialization in East Asia*. Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197520253.001.0001>
- Fahra Williams, T., & Daniah, R. (2023). Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-

- CEPA) pada Tahun 2019. *Interdependence Journal of International Studies*, 4, 1–14.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change*.
- Free Trade Agreement Center. (2023, January 2). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Ftacenter.Kemendag.Go.Id.  
<https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>
- Gao, H. (2022). *The Investment Chapter in the Regional Comprehensive Economic Partnership: Enhanced Rules without Enforcement Mechanism*.  
<http://rtais.wto.org>
- George, B. (2018). Issue Information - TOC. *Australian Journal of Public Administration*, 77(S1). <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12366>
- Gultom, D. (2020). *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*.
- Güngör, G., & Tutumlu, A. (2012). “The Rise of ‘Diminished Multilateralism’: East Asian and European Forum Shopping in Global Governance.” *Asia Europe Journal*, 3(9), 255–270.
- Ibrahim, B., Maurelly Aisyah Putri, D., & Safa Amira, N. (2024). *Kerja Sama Jakarta-New South Wales dalam Kerangka Paradiplomasi melalui IA-CEPA Jakarta-New South Wales Cooperation in the Framework of Paradiplomacy through IA-CEPA* (Vol. 1, Issue 2).
- Julie Bishop. (2018). *ASEAN: The nexus of the Indo-Pacific*.  
<https://www.foreignminister.gov.au/minister/julie-bishop/speech/asean-nexus-indo-pacific>.
- Kassam, N. (2021). *Lowy Institute Poll 2021*.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes* (1st ed.). Cornell University Press.
- Lebow, R. N. (1997). *Institutions and Information: Domestic Politics and International Relations* by. Princeton University Press.
- Lukas Andri Surya Singarimbun, Christina Vania Winona, Maria Angela Koes Sarwendah, & Narinda Marsha Paramastuti. (2022, September). *Eksistensi RCEP bagi Perwujudan Kepentingan ASEAN*. Cwts.Ugm.Ac.Id.  
<https://cwts.ugm.ac.id/2022/09/16/5447/>
- Manger, M. S. (2014). The economic logic of Asian preferential trade agreements: The role of intra-industry trade. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 151–184. <https://doi.org/10.1017/S1598240800008894>
- Parliament of Australia. (2021). *Role of the Joint Standing Committee on Treaties*. Parliament of Australia. <https://www.aph.gov.au/>
- Peter, A., Petri, & Plummer, M. G. (2020). East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia’s New Trade Blocs. *Peterson Institute For International Economics*, 1–35.
- Pratama, M. F., Sosa, P. I., & Yulianto, T. (2022). Motif dan Kepentingan China dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2598–9944.  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2660/http>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 3(42).

- Putri, G. (2023). *ANALISIS DAMPAK REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*. Universitas Islam Indonesia.
- Ranald, & Patricia. (2020). RCEP Has Limited Trade Gains and Ignores Labour and Human Rights. *Australian Fair Trade and Investment Network (AFTINET)*.
- Ravenhill, J. (2014). Ravenhill, John. *Global Political Economy*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. *Global Political Economy*.
- Ravenhill, J. (2017a). *Global Political Economy* (Vol. 5). Oxford University Press.
- Ravenhill, J. (2017b). *Global Political Economy* (Vol. 5). Oxford University Press.
- Reuters. (2021). *Australia joins New Zealand to ratify regional trade pact RCEP*. <https://www.thejakartapost.com/business/2021/11/03/australia-joins-new-zealand-to-ratify-regional-trade-pact-rcep.html>.
- Richard Marles. (2018). *Richard Marles | US and Australian strategy in the Indo-Pacific*. <https://www.ussc.edu.au/richard-marles-us-and-australian-strategy-in-the-indo-pacific>.
- Rusmin, J. H., Suryadi, A., & Abdullah, N. (2021). Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018. In *Hasanuddin Journal of International Affairs* (Vol. 1, Issue 2). Online.
- Ryan Neelam. (2023). *2023 Report*.
- Taqfir, U. S. (2025). INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY (IPEF) AND ASEAN CENTRALITY: ASEAN'S ROLE IN ENHANCING THE ACHIEVEMENT OF POLITICAL ECONOMIC COOPERATION. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(2), 191–198. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i2.62022>
- Ulyani Tarigan, K., & Siregar, M. (2023). Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.131>
- United Nation ESCAP. (2019). *China's economic transformation: Impacts on Asia and the Pacific*.
- Wang, D., Xu, P., An, B., & Song, Y. (2024). How does the development of the digital economy in RCEP member countries affect China's cross-border e-commerce exports? *PLOS ONE*, 19(12), e0310975-. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310975>
- Wilson, J. (2022). Tough times: Securing Australia's trade in an era of upheaval. *Australian Foreign Affairs*, 16, 28–47. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.769219284422927>
- Woolcock, S. (2017a). *THE NEW ECONOMIC DIPLOMACY* (N. Bayne & S. Woolcock, Eds.; 4th ed.). Routledge.
- Woolcock, S. (2017b). *THE NEW ECONOMIC DIPLOMACY* (N. Bayne & S. Woolcock, Eds.; 4th ed.). Routledge.
- Xue, F., Chen, T., & Xu, M. (2024). Effects of Regional Comprehensive Economic Partnership Entry into Force on Aquatic Products Trade Among

- Parties. *Sustainability (Switzerland)*, 16(23).  
<https://doi.org/10.3390/su162310620>
- Yudono, R. M., Dwi, W. R., Program, A., Ilmu, S., Internasional, H., Veteran, U., Chairil, J. M., & Setiawan, A. (n.d.). Respon ASEAN Terhadap Mundurnya India Dari Kerja Sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 2020.
- Yunarwanto. (2019). Dampak Keikutsertaan Indonesia di Dalam RCEP Terhadap Volume Perdagangan-Bukti Dari Gravity Model. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 3, 1–10. <https://doi.org/10.31685/kek.V3i1.436>
- Zreik, M. (2025). The Impact and Implications of RCEP on Economic Relations between China and Southeast Asian Economies. *European Journal of East Asian Studies*, 24(1), 51–69.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15700615-02401002>